

**DINASTI POLITIK DALAM PERSPEKTIF ETIKA POLITIK
(Studi Kasus Eva Dwiana Di Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung 2024)**

(Skripsi)

Oleh

RACHEL MAHARANI

2116021076



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

DINASTI POLITIK DALAM PERSPEKTIF ETIKA POLITIK (STUDI KASUS EVA DWIANA DI PEMILIHAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG 2024)

Oleh

RACHEL MAHARANI

Dinasti politik lebih mencerminkan praktik politik kekerabatan yang memusatkan kekuasaan pada jaringan keluarga, bukan bagian dari sistem pemerintahan di Indonesia. Di Kota Bandar Lampung, pencalonan Eva Dwiana sebagai Wali Kota Bandar Lampung tahun 2024 setelah dua periode kepemimpinan Herman HN menjadi fenomena yang menimbulkan perdebatan mengenai praktik dinasti politik ditinjau dari perspektif etika politik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterlibatan Herman HN dalam pencalonan Eva Dwiana, menelaahnya dari perspektif etika politik, serta menganalisis implikasi keberlanjutan kekuasaan keluarga terhadap kualitas demokrasi lokal di Kota Bandar Lampung.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, studi pustaka dan studi kasus. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana praktik dinasti politik di Kota Bandar Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Herman HN dalam pencalonan Eva Dwiana bersifat tidak langsung namun memiliki pengaruh melalui jaringan sosial dan politik yang telah dibangun sebelumnya. Dari perspektif etika politik, pencalonan Eva Dwiana mencerminkan dinamika antara legalitas dan moralitas politik, dalam prosesnya sah secara hukum tetapi menimbulkan dilema etis mengenai keadilan dan kesetaraan kesempatan. Selain itu, keberlanjutan kekuasaan dalam satu lingkaran keluarga memiliki implikasi ganda terhadap kualitas demokrasi lokal menjaga stabilitas pemerintahan dan kesinambungan kebijakan di satu sisi, namun berpotensi mengurangi kompetisi politik yang setara di sisi lain. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik dinasti politik di Kota Bandar Lampung mencerminkan tantangan bagi penerapan etika politik dalam demokrasi lokal. Sehingga diperlukan penguatan nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab moral dalam proses demokrasi lokal.

Kata Kunci : Dinasti Politik, Etika Politik, Eva Dwiana, Pemilihan Kepala Daerah.

ABSTRACT

POLITICAL DYNASTY IN THE PERSPECTIVE OF POLITICAL ETHICS (CASE STUDY OF EVA DWIANA IN THE 2024 BANDAR LAMPUNG MAYORAL ELECTION)

By

RACHEL MAHARANI

Political dynasties reflect the practice of kinship politics that concentrates power in family networks, rather than being part of the Indonesian government system. In Bandar Lampung City, Eva Dwiana's candidacy for mayor in 2024 after Herman HN's two terms in office has sparked debate about the practice of political dynasties from a political ethics perspective. This study aims to describe Herman HN's involvement in Eva Dwiana's candidacy, examine it from a political ethics perspective, and analyze the implications of continued family power for the quality of local democracy in Bandar Lampung City. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques through interviews, documentation, literature review, and case studies. The focus of the research is directed at how political dynasties operate in Bandar Lampung City. The results indicate that Herman HN's involvement in Eva Dwiana's candidacy is indirect but exerts influence through previously established social and political networks. From a political ethics perspective, Eva Dwiana's candidacy reflects the dynamic between legality and political morality. The process is legally valid but raises ethical dilemmas regarding justice and equality of opportunity. Furthermore, the continuity of power within a single family circle has dual implications for the quality of local democracy: maintaining government stability and policy continuity on the one hand, while potentially reducing equal political competition on the other. This study concludes that the practice of political dynasties in Bandar Lampung City represents a challenge to the application of political ethics in local democracy. Therefore, it is necessary to strengthen the values of justice, transparency, and moral responsibility in the local democratic process.

Keywords: Political Dynasty, Political Ethics, Eva Dwiana, Regional Head Elections.

**DINASTI POLITIK DALAM PERSPEKTIF ETIKA POLITIK
(Studi Kasus Eva Dwiana Di Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung 2024)**

Oleh

RACHEL MAHARANI

2116021076

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**: DINASTI POLITIK DALAM PERSPEKTIF
ETIKA POLITIK (Studi Kasus Eva Dwiana Di
Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung 2024)**

Nama Mahasiswa

: Rachel Maharani

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2116021076

Program Studi

: S-1 Ilmu Pemerintahan

Jurusan

: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

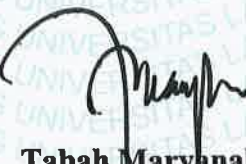
: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

**Dr. R Pitojo Budiono, M.Si.
NIP. 196405081993031004**

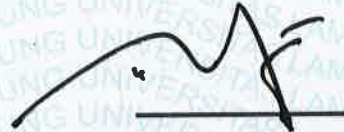
2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


**Tabah Maryanah
NIP. 197106042003122001**

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. R Pitojo Budiono, M.Si.**



Penguji Utama : **Prof. Hertanto, M.Si., Ph.D.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 1976082120 0003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **15 Oktober 2025**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Rachel Maharani
NPM. 2116021076

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Rachel Maharani, dilahirkan di Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2002. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara, putri dari pasangan Bapak Herwanto Bito, S.Sos., M.H. dan Ibu Nekmasuri, S.E., M.M. Penulis memiliki dua adik perempuan yang bernama Ocha Intania dan Githa Aurelia serta satu adik laki-laki yang bernama Rafael Alrizky Bito.

Jenjang pendidikan Penulis dimulai pada tahun 2006–2007 di RA Al-Islamiyah Menggala. Selanjutnya, pada tahun 2007–2013, Penulis melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri Lebu Dalem. Setelah lulus jenjang pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD), Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP N 1 Menggala pada tahun 2013-2016. Kemudian Penulis melanjutkan jenjang pendidikannya ke Sekolah Menengah Atas di MAS Diniyyah Putri Lampung pada tahun 2016-2020. Pada tahun 2020-2024 Penulis melanjutkan pendidikannya ke tingkat Perguruan Tinggi Swasta di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya melalui jalur Tes CAT dan dinyatakan lulus pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya. Pada tahun 2021 Penulis melanjutkan lagi jenjang pendidikannya ke tingkat Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan dinyatakan lulus pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung tahun 2021.

Selama Penulis melaksanakan studi pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, berbagai kegiatan diikuti

oleh Penulis baik akademik maupun non akademik demi menunjang kapasitas diri Penulis. Penulis mulanya bergabung pada Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sebagai Anggota Magang pada Biro 1 Periode 2022/2023 yang membidangi bidang kajian dan keilmuan. Kemudian Penulis tetap melanjutkan karir di dunia kemahasiswaannya di Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sebagai Ketua Komisi II Periode 2023/2024 yang membidangi di bidang Keuangan dan Administrasi.

Pada saat menjadi mahasiswa Penulis ikut serta dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung kurang lebih selama 6 bulan, dimulai dari tanggal 15 Februari 2024 sampai 02 Agustus 2024. Selanjutnya Penulis pernah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2025 di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan selama 30 hari.

Selain di internal kampus Penulis juga menjalani aktivitas organisasi di lembaga eksternal kampus pada tahun 2022, Penulis tercatat sebagai Anggota Biasa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sosial Politik Universitas Lampung Cabang Kota Bandar Lampung setelah mengikuti Latihan Kader I (Basic Training) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sosial Politik Universitas Lampung Cabang Kota Bandar Lampung. Selanjutnya pada tahun 2023, Penulis mendapatkan amanah sebagai Anggota Departemen Penelitian, Pengembangan dan Pembinaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sosial Politik Universitas Lampung Cabang Kota Bandar Lampung Periode 2023/2024.

MOTTO HIDUP

“Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluannya).”

(Qs. At-Talaq : 3)

“Otak sebagai sumber pikiran harus selalu terkoneksi dengan hati. Hati yang bersih dan pikiran yang jernih akan hasilkan ide-ide besar yang mampu mengubah kehidupan.”

(Joko Widodo Presiden RI ke 7)

" Pendidikan adalah perhiasan paling indah bagi seorang perempuan."

(Mary Wollstonecraft)

" Menjadi Wanita Yang Tak Lupa Akan Kodratnya, Namun Tetap Berdaya Dengan Ilmu, Berguna Bagi Bangsa, Dan Senantiasa Dekat Dengan Tuhannya."

(Rachel Maharani)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiin Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini
Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW Semoga kelak karya ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat

Karya Tulis ini khusus saya persembahkan kepada:

Cinta Pertama dan Pintu Surgaku

Herwanto Bito, S.Sos., M.H. & Nekmasuri, S.E., M.M.

Dengan segala kerendahan hati, saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas cinta yang tak terukur, doa yang tak pernah henti, serta kesabaran dan pengorbanan yang telah menjadi cahaya dalam setiap langkah saya. Segala pencapaian ini tidak akan pernah tercapai tanpa keikhlasan dan kasih sayang yang tulus dari Papa dan Mama. Semoga Allah SWT senantiasa membalas setiap kebaikan dan jerih payah kalian dengan keberkahan yang tiada akhir.

Terima kasih untuk semua yang telah mendoakan dan mendukung Penulis selama ini, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Almamater yang penulis banggakan
“Universitas Lampung”

SANWACANA

Bismillaahirrohmaanirrohim.

Puji syukur dan terima kasih yang begitu berlimpah penulis ucapkan kepada Tuhan YME untuk setiap penyertaan-Nya dalam setiap proses yang terjadi di dalam hidup penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Dinasti Politik Dalam Perspektif Etika Politik (Studi Kasus Eva Dwiana Di Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung 2024)”**

Sanjungan shalawat dan tak khilaf tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sang revolusioner sejati yang telah mengubah sejarah kehidupan kegelapan menjadi alam yang terang benderang bahkan sampai pada era revolusi 4.0, sang pemberi suri tauladan bagi ummat manusia dan peradabannya.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Suatu kehormatan dan kebanggan bagi penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;

3. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.I.P., M.A. Selaku wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
6. Ibu Dr. Tabah Maryanah selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang juga menjadi panutan penulis dalam meneladani karakter perempuan yang kuat dan menginspirasi. Terima kasih atas masukan saran dan semangat yang telah ibu berikan kepada penulis.
7. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan.
8. Bapak Dr. R Pitojo Budiono, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing penulis persembahkan karya ini sebagai wujud rasa hormat dan terima kasih mendalam. Dalam setiap arahan, penulis belajar bahwa bimbingan bukan sekadar menunjukkan jalan, tetapi juga menyalakan cahaya agar langkah tidak terhenti dalam gelap. Kesabaran dan ketelitian yang bapak berikan telah menjadi cermin bahwa ilmu sejati adalah kesediaan untuk menuntun tanpa lelah.
9. Prof. Hertanto, M.Si., Ph.D. Selaku Dosen Penguji dengan penuh hormat penulis persembahkan rasa terima kasih mendalam. Setiap kritik, pertanyaan, dan saran yang bapak berikan bukan sekadar penilaian, melainkan sebuah ruang pembelajaran yang menajamkan nalar, memperkaya wawasan, dan mematangkan pemikiran. Dari ketegasan dan arahan bapak, penulis memahami bahwa ujian bukanlah penghalang, melainkan jembatan untuk tumbuh lebih kuat dan lebih arif dalam perjalanan ilmu.

10. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada bapak dan ibu semua. Terima kasih atas dedikasi yang telah di berikan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga bapak dan ibu selalu sehat dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT;
11. Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Ibu Mertayana dan Mba Wulan. Terima kasih telah membantu penulis dalam hal administrasi perkuliahan selama ini. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT;
12. Kepada DPRD Provinsi Lampung, terimakasih telah memberi kesempatan pada penulis untuk dapat melaksanakan MBKM selama 6 bulan. Terima kasih atas pengalaman pekerjaan, canda tawa yang penulis alami dan rasakan.
13. Kepada kedua orang tua penulis, Papa dan Mama dua sosok yang menjadi akar kehidupan kanjeng. Dari kalian kanjeng belajar, bahwa cinta bukan sekadar kata, melainkan pengorbanan yang sunyi, doa yang tak pernah terdengar namun selalu hadir, dan ketulusan yang tak membutuhkan balasan. Papa, yang langkah teguhnya mengajarkan kanjeng arti ketegaran. Mama, yang kelembutan hatinya menuntunku memahami kasih yang tak bersyarat. Dalam setiap tetes peluh, setiap nasihat, dan setiap doa yang kalian titipkan di keheningan malam, kanjeng menemukan kekuatan untuk terus melangkah. Karya ini adalah buah kecil dari pohon besar pengorbanan kalian.
14. Kepada Adik-adik penulis, Ocha Intania, Githa Aurelia dan Rafael Alrizky Bito, kalian adalah alasan kanjeng belajar lebih keras, agar kelak kanjeng dapat menjadi teladan dan penjaga arah di setiap langkah kalian. Senyum kalian adalah penyemangat yang menolak keputusasaan, dan tawa kalian adalah pengingat bahwa kebahagiaan sejati lahir dari kesederhanaan. Karya ini kupersembahkan sebagai

tanda bahwa perjuangan bukan hanya untuk kanjeng, tetapi juga untuk membuka jalan agar kalian berani bermimpi setinggi-tingginya tanpa rasa takut.

15. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya Reza Yuda Pratama. Yang kehadirannya bagai oase di tengah perjalanan panjang penuh kerikil. Kamu adalah teman diskusi di kala bimbang, peneduh dalam resah, sekaligus pengingat bahwa cinta bukan hanya perasaan, melainkan keberanian untuk tumbuh bersama. Dalam keheningan dan kebersamaan kita, penulis belajar bahwa keberhasilan terasa lebih indah ketika ada seseorang yang bersedia berbagi senyum, air mata, dan doa di setiap langkah. Persembahan ini kutitipkan pula kepadamu, sebagai bagian dari cerita yang kita ukir bersama sebuah perjalanan yang tidak hanya berhenti pada titik keberhasilan, tetapi terus bergerak menuju masa depan yang penuh harapan.
16. Kepada Uti Dira Yolandari dengan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Uti Dira seseorang yang hadir dalam hidup penulis tidak sekadar sebagai saudara, tetapi seperti kakak sendiri. Dari diri uti penulis belajar bahwa ketangguhan tidak selalu berarti tanpa luka, justru keberanian sejati sering lahir dari hati yang pernah rapuh. Terima kasih atas ketulusan, semangat, dan doa yang selalu mengiringi langkah penulis. Kehadiran uti menjadi pengingat bahwa kekuatan manusia bukan hanya tentang berdiri tegak, tetapi juga tentang mampu bangkit meski berulang kali jatuh. Penulis percaya, setiap perjuangan yang uti jalani sedang menyiapkan jalan kemenangan. Semoga tahun depan menjadi titik terang bagi uti saat segala usaha, doa, dan harapan berpadu menjadi kenyataan yang indah.
17. Teruntuk Suci Insyira Abbas, Kawan kecil penulis, bukan sekadar bagian dari masa lalu, tetapi juga saksi perjalanan hidup penulis sejak tawa polos hingga langkah dewasa. Bersamamu aku belajar arti kebersamaan yang tulus, tanpa syarat, dan tanpa kepura-puraan. Persahabatan kita adalah rumah kenangan yang tak lekang oleh waktu

dan tempat penulis selalu bisa kembali, meski jarak dan waktu mencoba memisahkan. Terima kasih telah tumbuh bersama, menjadi saksi, sekaligus penguat dalam setiap fase hidup penulis.

18. Kepada Crazy Rich sahabat seperjalanan Della Putri Azzahra dan Refina Amalia Taufiq, yang bersama-sama menapaki jalan penuh dinamika di dunia perkuliahan. Kita pernah jatuh, bangkit, tertawa, bahkan terdiam bersama, dan dari situ penulis belajar bahwa persahabatan sejati bukan diukur dari lamanya waktu, melainkan dari seberapa tulus kita saling menguatkan. Lingkaran pertemanan ini adalah ruang belajar yang tak kalah penting dibanding ruang kelas, sebab di dalamnya kita menemukan makna kerja sama, keteguhan, dan keikhlasan. Kini, ketika perjalanan akademik ini mencapai akhir, doa terbaik penulis adalah agar setiap langkah kalian dipertemukan dengan jalan rezeki yang sesuai dengan impian, dan pekerjaan yang mampu menghadirkan kebahagiaan sekaligus kebermanfaatan. Semoga pertemanan ini tetap abadi, menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu yang indah dengan masa depan yang penuh cahaya.
19. Kepada sahabat penulis di masa-masa perkuliahan Leila Fatimah Azzahra Dirman, Terima Kasih atas setiap langkah yang kita lalui bersama di jalan terjal, di tengah badai, bahkan saat cahaya terasa redup. Kehadiranmu membuat perjalanan yang berat ini menjadi berarti, karena penulis belajar darimu arti keteguhan, kesabaran, dan keberanian untuk tidak menyerah. Penulis tahu badai yang kau hadapi belum sepenuhnya reda, namun percayalah, badai tidak diciptakan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan. Doa penulis, semoga engkau segera menemukan tenang setelah gelisah, terang setelah gelap, dan kesuksesan setelah segala pengorbanan. Semoga langkahmu selalu dimudahkan, rezekimu dilapangkan, dan hatimu dijaga dalam keteguhan. Persahabatan kita adalah saksi, bahwa perjuangan bukan sekadar tentang hasil, melainkan tentang siapa yang berjalan bersama kita di tengah gelap menuju terang.

20. Kepada adik adik itu yang sudah di anggap sebagai saudaraku, Sisy Pristhysila dan Safira Ghassani Zatalina. Terima kasih atas setiap bantuan, dukungan, dan ketulusan kalian yang selalu hadir di tengah berbagai kesulitan yang penulis hadapi. Kehadiran kalian menjadi penguat di saat lelah dan pengingat bahwa perjuangan tidak harus dijalani sendirian. Semoga segala kebaikan yang kalian berikan dibalas dengan kemudahan, kesuksesan, dan kebahagiaan dalam setiap langkah kehidupan.
21. Kepada Sabrina Aisyah, adik bina yang telah hadir dengan tulus, membantu selama KKN, dan tetap setia menemani dalam berbagai drama kehidupan setelahnya. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian, dukungan, dan kebaikan yang engkau berikan. Kehadiranmu bukan hanya meringankan setiap kesulitan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa dalam perjalanan hidup ini selalu ada orang baik yang mau hadir tanpa pamrih. Doa penulis, semoga engkau senantiasa diberikan kelapangan rezeki, kemudahan dalam setiap urusan, serta keberhasilan dalam menggapai cita-cita. Lebih dari itu, semoga kelak engkau dipertemukan dengan jodoh terbaik, yang mampu menghargai ketulusan dan menemanimu dalam setiap langkah kehidupan.
22. Kepada teman-teman seperjuangan Governance²¹ Kepada teman-teman satu angkatan yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, serta semangat yang kita bangun bersama selama masa perkuliahan. Kita telah melalui suka maupun duka, belajar saling mendukung, dan tumbuh bersama di tengah berbagai tantangan. Semoga persaudaraan ini tetap terjalin meskipun langkah kita kelak berbeda arah. Doa penulis, semoga setiap dari kita dimudahkan jalannya, diraih kesuksesan sesuai cita-cita, dan mampu memberi manfaat di manapun kita berada.
23. Kepada Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN), Bina, Ayi, Rora, Dewo, Sultan dan Rasyid, yang juga adik-adik penulis terkasih, terima

kasih karena telah menjadi bagian dari perjalanan yang penuh arti. Dari kebersamaan kita, penulis belajar bahwa pengabdian bukan hanya tentang program yang kita jalankan, tetapi tentang hati yang saling menguatkan dan semangat yang kita jaga bersama. Perjalanan kalian menuju tugas akhir mungkin terasa berat, namun percayalah setiap perjuangan adalah pintu menuju kedewasaan, dan setiap kesulitan adalah jalan yang menuntun pada kebijaksanaan. Menjadi sarjana bukan sekadar gelar, melainkan simbol dari keteguhan hati yang mampu bertahan di tengah badai dan bangkit di saat lelah. Doa penulis, semoga kalian dimudahkan dalam menapaki langkah terakhir menuju wisuda, diberikan kekuatan untuk menyelesaikan segala proses dengan baik, dan kelak meraih kesuksesan yang membanggakan. Semoga persaudaraan yang terjalin dalam KKN ini tetap menjadi kenangan indah yang menguatkan kita di setiap perjalanan hidup.

24. Kepada Teman seperjuangan Magang, Maya, Mauzel dan Resna yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dan dukungan yang telah diberikan selama menjalani proses magang. Dari kalian, penulis belajar arti kerja tim, saling menghargai, dan bertumbuh bersama di lingkungan baru yang penuh tantangan. Semoga kebersamaan ini tidak berhenti hanya pada masa magang, tetapi tetap menjadi jembatan persaudaraan di kemudian hari. Doa penulis, semoga setiap dari kita dimudahkan jalannya, diberikan kesempatan untuk berkembang lebih jauh, dan mencapai kesuksesan dalam dunia kerja maupun kehidupan.
25. Kepada Saudara-saudara seperjuangan Himpunan Mahasiswa Islam Sosial Politik Unila. Desta, Liza, Ropel, Refina, Della, Fajri, Mulyo, Adit, Nico, Bisma, Wahyu dan Raihan. Terimakasih telah membersamai penulis di rumah tercinta Tondano 35. Rumah kecil yang penuh ide, gelak tawa, perdebatan setiap diskusi, agenda, hingga lembur tak berkesudahan, hangat, dan mimpi- mimpi besar. Setiap diskusi, agenda, hingga lembur tak berkesudahan, menjadi bagian dari proses belajar

yang tak ternilai harganya. Terima kasih atas kebersamaan yang tulus, atas solidaritas yang tidak pernah setengah hati, dan atas semangat juang yang terus menyala. Semoga tali persaudaraan ini tetap terjaga, dan setiap dari kita terus melangkah maju dengan semangat yang sama.

26. Kepada Bang Fadil, Bang Nendy, Bang Ibor, Bang Restu, Bang Iko, Bang Zaky, Bang Rama, Bang Rapli, Bang Husein dan Bang Sabiel. Terima kasih telah menjadi kanda-kanda yang selalu hadir dengan bimbingan, semangat dalam perjalanan ini. Terima kasih atas waktu, nasihat, dan kebersamaan yang telah kalian berikan, baik dalam diskusi serius maupun dalam canda ringan yang menghangatkan suasana. Semoga kebaikan dan ketulusan kalian dibalas dengan keberkahan, kesuksesan selalu menyertai di setiap jalan yang kalian pilih.
27. Kepada Yunda-yundaku tersayang, Mba Wenti, Mba Roro, Mba Ainun dan Mba Yulisa. Terima kasih telah memberikan kehangatan, kebahagiaan, dukungan yang senantiasa diberikan selama penulis berproses. Semangat dan komitmen, kalian telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi yang membuat setiap tantangan terasa lebih ringan untuk dilalui bersama. Terima kasih atas segala peran yang dilakukan, semoga yunda-yundaku dipermudah segala urusannya dan kelak menjadi wanita yang sukses Amiin.
28. Kepada informan penelitian penulis Bapak Arie Oktara, S.IP., M.A., Bapak Oddy Marsa JP., S.H., M.H., Mba Anita Noverda, Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP., Bapak Mayrozi Dwi Sulisty, S.Sos.i., Bapak Vincensius Soma Ferrer, S. A.N., M. Si., Ibu Siti Khoiriah, S.H.I., M.H., Ibu Melinda, S.Sos., M.M., Steven Erlinto, Bisma Nugroho, S. IP., dan Safira Ghassani, S.IP. Para informan yang hebat, terima kasih telah meluangkan waktu, berbagi pengalaman, serta membuka jalan bagi penulis untuk memahami lebih dalam tentang perjalanan ini. Setiap kisah, pengetahuan, dan ketulusan yang kalian berikan menjadi sumber inspirasi yang berharga. Semoga jejak keberhasilan yang telah kalian ukir dapat menjadi penerang jalan bagi penulis, sehingga kelak penulis

pun mampu melangkah dan menapaki jalan yang sama baiknya seperti kalian. Doaku, semoga kalian senantiasa diberkahi kesehatan, rezeki yang lapang, dan kesuksesan yang terus bertambah di setiap langkah.

29. Terakhir, Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada diri sendiri. Namaku adalah doa dan perjalanan. *Rachel* melambangkan kelembutan, kesabaran, dan kasih; sedangkan *Maharani* adalah simbol keanggunan, kebijaksanaan, dan kekuatan seorang pemimpin. Dalam diriku, kelembutan tidak berarti lemah, dan kekuatan tidak berarti keras keduanya berpadu untuk menghadirkan keseimbangan seorang wanita. Seorang wanita sejati bukan diukur dari seberapa tinggi ia berdiri, melainkan dari seberapa dalam ia merendah untuk menimba ilmu dan membaginya kembali. Sebab ilmu, bila disimpan, hanyalah beban tetapi bila disalurkan, ia menjelma cahaya yang menuntun.

Pada akhirnya, aku ingin mengucapkan terima kasih yang paling tulus untuk diriku sendiri. Terima kasih sudah berani berjalan sejauh ini, menempuh jalan panjang yang kadang terasa melelahkan, kadang begitu membingungkan, namun tak pernah membuatku benar-benar berhenti. Terima kasih sudah sabar menanggung rasa lelah, tetap berusaha meski dikejar waktu, dan belajar bangkit setiap kali jatuh.

Aku tahu, tidak mudah menjaga semangat ketika ragu datang, tidak mudah tetap kuat saat kesepian menghantui, dan tidak mudah tetap percaya ketika dunia terasa menutup jalan. Namun, aku tetap melangkah. Aku belajar bahwa diriku bukan hanya sekadar sosok yang menulis skripsi, melainkan jiwa yang berani menghadapi rasa takut, bertarung dengan diri sendiri, dan pada akhirnya memenangkan pertarungan itu. Skripsi ini bukan sekadar tulisan atau penelitian, melainkan cermin dari perjalanan panjang yang membentukku menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih percaya diri. Hari ini aku berdiri dengan bangga, karena aku menyadari diriku adalah rumah dari segala doa, perjuangan, dan harapan yang telah kujalani dengan sepenuh hati.

Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam perjalanan dan penyusunan skripsi ini. Akhir kata Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Akan tetapi Penulis berharap kiranya karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 29 September 2025
Peneliti

Rachel Maharani
NPM. 2116021076

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Penelitian Terdahulu.....	9
1.3. Rumusan Masalah	14
1.4. Tujuan Penelitian.....	14
1.5. Manfaat Penelitian.....	14
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1. Etika Politik.....	17
2.1.1. Dimensi Etika Politik	19
2.1.2. Urgensi Etika Politik bagi Kepala Daerah	23
2.2. Dinasti Politik.....	21
2.2.1. Pengertian Dinasti Politik	21
2.2.2. Tipologi Dinasti Politik.....	23
2.2.3. Terbentuknya Dinasti Politik	25
2.3. Demokrasi.....	21
2.3.1. Hubungan Antara Demokrasi dan Dinasti Politik.....	29
2.4. Kerangka Pikir.....	32
III. METODE PENELITIAN.....	35
3.1. Tipe Penelitian.....	35
3.2. Fokus Penelitian	36
3.3. Lokasi Penelitian	37
3.4. Jenis dan Data.....	37
3.5. Informan Penelitian	38
3.6. Teknik Pengumpulan Data	41

3.7. Teknik Pengolahan Data.....	41
3.8. Teknis Analisis Data.....	43
3.9. Teknis Validasi Data	44
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1. Profile Ibu Eva Dwiana	45
4.1.1. Perjalanan Karier Politik	45
4.1.2. Aktivitas Sosial dan Organisasi	46
4.1.3. Visi Kepemimpinan	47
4.1.4. Prestasi dan Penghargaan.....	49
4.2. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung.....	50
4.2.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah.....	50
4.2.2. Batas Wilayah Administratif.....	51
4.2.3. Kondisi Demografis	51
4.3. Hasil Penelitian.....	52
4.3.1. Dimensi Tujuan dalam Etika Politik	54
4.3.2. Dimensi Sarana dalam Etika Politik	69
4.3.3. Dimensi Aksi Politik dalam Etika Politik	82
4.4. Pembahasan	96
4.4.1. Bentuk Keterlibatan Herman HN dalam Pencalonan Eva Dwiana pada Pilwakot 2024.....	96
4.4.2. Perspektif Etika Politik dalam Fenomena Pencalonan Eva Dwiana di Pilwakot 2024	99
4.4.3. Implikasi Keberlanjutan Kekuasaan dalam Satu Lingkaran Keluarga terhadap Kualitas Demokrasi Lokal di Kota Bandar Lampung	102
V. SIMPULAN DAN SARAN.....	105
5.1. Simpulan.....	105
5.2. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Fenomena Dinasti Politik Dalam Pilkada Bandar Lampung.....	5
Tabel 2. Kategori dan Skor IKP Provinsi di Indonesia	7
Tabel 3. Kota Rawan Tertinggi	8
Tabel 4. Informan Penelitian	38

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pikir	34

DAFTAR SINGKATAN

Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
BPS	: Badan Pusat Statistik
DPC	: Dewan Pimpinan Cabang
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FJPI	: Forum Jurnalis Perempuan Indonesia
ITERA	: Institut Teknologi Sumatera
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
MA	: Mahkamah Agung
NU	: Nahdlatul Ulama
PDI-P	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
Pemkot	: Pemerintah Kota
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
RUU	: Rancangan Undang-Undang
TSM	: Terstruktur, Sistematis dan Masif
UIN RIL	: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Unila	: Universitas Lampung

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Istilah dinasti adalah sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan darah dan keturunan dari hanya beberapa orang. Pengertian politik dinasti adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu untuk bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan disuatu negara.

Menurut Dwipayana (2016), Tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional, yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang *merit system*, dalam menimbang prestasi. Menurutnya, kini disebut neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. “Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural.” anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik.

Politik dinasti sesungguhnya tidaklah melanggar konstitusi, akan tetapi hal tersebut tidak sejalan prinsip demokrasi dan etika politik. Dalam konteks membangun demokrasi yang substansial, seharusnya kita harus mengedepankan pertimbangan etika dan kepantasan politik ketimbang mengacu atas norma undang-undang yang tidak bisa mengatur secara rinci dan akan tetap memiliki celah untuk disiasati. Dalam diskursus demokrasi, dinasti politik kerap diasosiasikan dengan praktik nepotisme dan pelanggaran kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip meritokrasi. Namun, pendekatan etika politik yang

lebih komprehensif memungkinkan kita untuk menelaah fenomena ini tidak hanya dari sisi negatif, tetapi juga dari potensi kontribusi positifnya terhadap stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan. Etika politik, sebagai cabang filsafat moral yang mengkaji perilaku politik berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kesejahteraan publik, memberikan kerangka untuk menilai praktik dinasti politik secara lebih adil. Dalam konteks ini, dinasti politik dapat dipandang sebagai mekanisme yang, dalam kondisi tertentu, mampu menjamin kesinambungan kebijakan dan pembangunan, serta memperkuat partisipasi politik masyarakat melalui identifikasi yang kuat terhadap figur-figur politik yang dikenal dan dipercaya.

Penelitian oleh Rusmana et al. (2024) menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus di Indonesia, dinasti politik berperan dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan melanjutkan program-program pembangunan yang telah dirintis sebelumnya *Journal of FORIKAMI*. Hal ini terutama terjadi ketika anggota keluarga yang melanjutkan kekuasaan memiliki kompetensi dan integritas yang memadai, serta didukung oleh legitimasi elektoral yang kuat.

Lebih lanjut, studi oleh Sucipto et al. (2023) mengemukakan bahwa dinasti politik dapat berkontribusi positif terhadap demokrasi lokal apabila disertai dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang aktif. Dalam kerangka etika politik, hal ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara hak individu untuk berpartisipasi dalam politik dan kebutuhan kolektif akan pemerintahan yang efektif dan responsif.

Namun, penting untuk dicatat bahwa potensi positif dinasti politik hanya dapat terwujud apabila praktik tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip etika politik, seperti keadilan, kesetaraan, dan kepentingan umum. Oleh karena itu, analisis terhadap dinasti politik perlu mempertimbangkan konteks lokal, kualitas kepemimpinan, serta mekanisme checks and balances yang ada.

Fenomena dinasti politik kian menjadi sorotan dalam lanskap demokrasi lokal Indonesia. Istilah ini merujuk pada dominasi kekuasaan politik oleh satu keluarga yang berlangsung secara berkelanjutan, baik secara langsung maupun melalui pengaruh struktural dan simbolik. Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah terbentuknya dinasti politik di Kota Bandar Lampung melalui pasangan suami dan istri yaitu Herman HN dan Eva Dwiana.

Herman HN menjabat sebagai Wali Kota Bandar Lampung selama dua periode, dari 2010 hingga 2021. Keberhasilannya dalam memenangi dua kali pemilihan kepala daerah tak dapat dilepaskan dari kontribusi besar sang istri, Eva Dwiana. Di balik layar, Eva aktif dalam membangun citra sosial keluarga melalui kegiatan keagamaan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya kaum perempuan. Ia mendirikan Majelis Taklim Rachmat Hidayat pada tahun 2007, yang menjadi instrumen sosial sekaligus basis elektoral yang signifikan bagi Herman HN. Jejaring ini bukan hanya memperkuat posisi suaminya secara politik, tetapi juga membuka jalan bagi dirinya sendiri untuk masuk ke panggung politik formal.

Eva Dwiana tidak hanya berperan sebagai pendamping politisi, tetapi juga menunjukkan kapasitas politik yang mandiri. Eva memulai kiprahnya di dunia politik dengan menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandar Lampung pada tahun 2011. Kemudian, pada tahun 2014, beliau bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan menjabat sebagai Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPD PDIP Lampung. Dalam pemilihan legislatif 2014, Eva terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2014–2019, dan kembali terpilih pada periode berikutnya dengan perolehan suara tertinggi, yaitu 86.258 suara dari total 146.294 suara partai di Bandar Lampung Saluran Media.

Selain aktivitas politik, Eva juga aktif dalam kegiatan sosial keagamaan. Beliau mendirikan Majelis Taklim Rachmat Hidayat pada tahun 2007, yang menjadi wadah pengajian rutin bagi ibu-ibu di Bandar Lampung. Kegiatan ini memperkuat kedekatannya dengan masyarakat dan membangun citra positif sebagai sosok yang peduli terhadap nilai-nilai keagamaan dan sosial menurut sumber IDN Times Lampung.

Pada Pilkada 2020, Eva Dwiana mencalonkan diri sebagai Wali Kota Bandar Lampung bersama Deddy Amarullah dan berhasil memenangkan pemilihan dengan perolehan suara 249.241, mengalahkan dua pasangan calon lainnya. Kemenangan ini menunjukkan bahwa Eva memiliki basis dukungan yang kuat di masyarakat, yang tidak semata-mata karena hubungan keluarga dengan mantan Wali Kota Herman HN, tetapi juga karena rekam jejak dan kontribusinya sendiri dalam dunia politik dan social Media Lampung

Pada Pilkada 2020, Eva Dwiana mencalonkan diri sebagai Wali Kota Bandar Lampung bersama Deddy Amarullah dan berhasil memenangkan pemilihan dengan perolehan suara 249.241, mengalahkan dua pasangan calon lainnya. Meskipun sempat didiskualifikasi oleh KPU karena dugaan pelanggaran administratif, Mahkamah Agung membatalkan keputusan tersebut, dan Eva resmi dilantik pada 26 Februari 2021. Karier politiknya menunjukkan bahwa ia memiliki legitimasi elektoral dan daya tarik tersendiri di mata publik. Ketika masa jabatan Herman HN berakhir, Eva maju dalam Pilkada 2020 dan berhasil memenangkan kontestasi, menjadikannya Wali Kota perempuan pertama di Bandar Lampung.

Fenomena dinasti politik di Kota Bandar Lampung mengalami perkembangan signifikan dengan keterlibatan keluarga Herman HN secara berkesinambungan dalam pemilihan kepala daerah. Berikut adalah ringkasan data terkini dari hasil Pilkada 2024 dan peran tokoh-tokoh kunci.

Tabel 1. Fenomena Dinasti Politik Dalam Pilkada Bandar Lampung

No	Tokoh / Calon	Jabatan / Posisi	Hubungan Keluarga	Tahun Pilkada	Hasil Suara (KPU)	Fenomena Dinasti Politik
1	Herman HN	Wali Kota Bandar Lampung (2 periode)	Suami Eva Dwiana	2010, 2015	358.254 suara (86.66%, 2015)	Menjabat dua periode, membangun basis politik keluarga
2	Eva Dwiana & Deddy Amarullah	Wali Kota & Wakil Wali Kota	Istri Herman HN	2020, 2024	2020: 249.134 suara (57.3%) 2024: 264.740 suara (74.27%)	Penerusan kekuasaan dari suami ke istri, kemenangan dua kali
3	Rahmawati Herdian	Anggota DPR RI (Lampung I)	Anak Eva & Herman	Pileg 2024	94.079 suara	Generasi ketiga masuk ke parlemen nasional
4	Partai Pengusung	Koalisi politik	Alat politik keluarga	2020–2024	NasDem, PKB, Gerindra, PAN, Golkar, PSI, PKS	Koalisi sebagai instrumen politik keluarga

Sumber: KPU Bandar Lampung

Kemenangan Eva Dwiana dalam Pilkada 2020 dan 2024 menunjukkan bahwa beliau memiliki basis dukungan yang kuat di masyarakat, yang tidak semata-mata karena hubungan keluarga dengan mantan Wali Kota Herman HN, tetapi juga karena rekam jejak dan kontribusinya sendiri dalam dunia politik dan sosial. Namun, keberhasilan ini juga menimbulkan perdebatan mengenai keberlanjutan kekuasaan dalam satu keluarga dan potensi pembentukan dinasti politik di daerah tersebut. Kemenangan ini memperkuat persepsi publik akan terbentuknya sebuah dinasti politik. Fenomena ini tidak berhenti sampai di situ. Anak mereka, Rahmawati Herdian, juga mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Dapil Lampung I, mempertegas adanya kesinambungan kekuasaan dalam lingkup

keluarga. Meski istilah "dinasti politik" sering kali diasosiasikan dengan konotasi negatif, dalam kasus ini terdapat sejumlah hal positif yang patut dianalisis lebih dalam. Di antaranya adalah keberlanjutan program pembangunan, peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, dan munculnya model kepemimpinan keluarga yang harmonis.

Namun, pencalonan Eva Dwiana kali ini menarik perhatian lebih dari sekedar isu dinasti politik. Muncul indikasi bahwa pencalonan Eva Dwiana tidak mendapatkan dukungan penuh dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), partai yang sebelumnya menjadi salah satu pendukung kuat keluarga Herman HN. Sikap PDI-P yang terkesan tidak memberikan dukungan penuh ini menjadi tanda tanya besar di kalangan masyarakat dan pengamat politik. Sebagai seorang petahana, Eva Dwiana diharapkan bisa menggalang dukungan dari partainya sendiri, namun situasi yang berkembang menunjukkan adanya perpecahan atau ketidaksepakatan di dalam tubuh partai. Dalam perspektif etika politik, permasalahan dinasti politik selalu berkaitan erat dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan transparansi.

Konflik Internal dalam PDI-P terkait dukungan terhadap Eva Dwiana salah satu isu penting yang muncul dalam pencalonan Eva Dwiana adalah indikasi bahwa PDI-P, yang sebelumnya mendukung pencalonan keluarganya, kali ini tidak solid dalam memberikan dukungan. Kondisi ini membuka perdebatan mengenai dinamika internal partai politik di Indonesia, terutama dalam konteks etika politik. Apakah penolakan atau minimnya dukungan dari partai politik terhadap kandidat dari dinasti politik menandakan adanya pergeseran nilai dan standar etika dalam partai. Apakah hal ini merupakan upaya dari partai untuk menghindari stigmatisasi politik dinasti, atau sekedar bentuk friksi internal.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa Pilkada Bandar Lampung 2024 tidak hanya dipengaruhi oleh "dinasti politik," tetapi juga terguncang oleh kerentanan sistemik mulai dari data pemilih, netralitas birokrasi, integritas pemungutan, hingga sengketa hasil. Dari perspektif etika politik, ini menjadi isu penting untuk penelitian, sebagai cermin kualitas demokrasi lokal dan pelaksanaan keadilan

procedural.

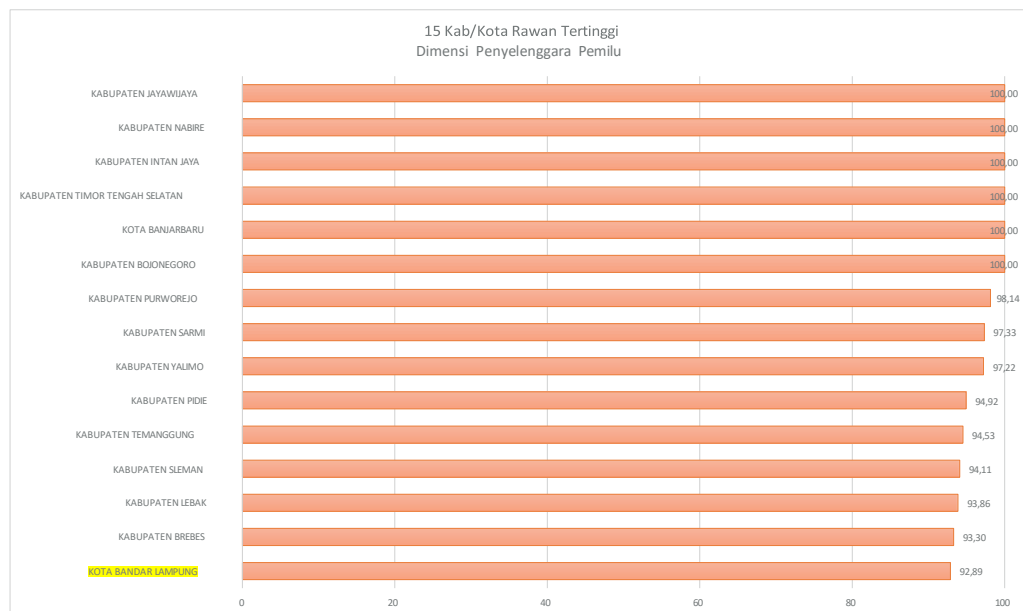
Tabel 2. Kategori dan Skor IKP Provinsi di Indonesia

No.	Provinsi	Jumlah (%)	Golongan	No.	Provinsi	Jumlah (%)	Golongan
1.	DKI Jakarta	88,95	Tinggi	18.	Sulawesi Barat	43,44	Sedang
2.	Sulawesi Utara	87,48	Tinggi	19.	Yogyakarta	43,02	Sedang
3.	Maluku Utara	84,86	Tinggi	20.	Kepulauan Riau	40,33	Sedang
4.	Jawa Barat	77,04	Tinggi	21.	Sumatera Barat	39,68	Sedang
5.	Kalimantan Timur	74,04	Tinggi	22.	Sulawesi Tenggara	38,32	Sedang
6.	Banten	66,53	Sedang	23.	Aceh	38,06	Sedang
7.	Lampung	64,61	Sedang	24.	Sumatera Selatan	35,07	Sedang
8.	Riau	62,59	Sedang	25.	Jawa Tengah	34,83	Sedang
9.	Papua	57,27	Sedang	26.	Kepulauan Bangka Belitung	29,89	Sedang
10.	Nusa Tenggara Timur	56,75	Sedang	27.	Kalimantan Utara	20,36	Rendah
11.	Sumatera Utara	55,43	Sedang	28.	Kalimantan Tengah	18,77	Rendah
12.	Maluku	53,69	Sedang	29.	Jawa Timur	14,74	Rendah
13.	Papua Barat	53,48	Sedang	30.	Kalimantan Barat	12,69	Rendah
14.	Kalimantan Selatan	53,35	Sedang	31.	Jambi	12,03	Rendah
15.	Sulawesi Tengah	52,90	Sedang	32.	Nusa Tenggara Barat	11,09	Rendah
16.	Bali	52,75	Sedang	33.	Sulawesi Selatan	10,20	Rendah
17.	Gorontalo	45,44	Sedang	34.	Bengkulu	3,79	Rendah

Sumber: Buku Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak Bawaslu RI 2024

Dalam tabel tersebut provinsi Lampung berada pada peringkat 7 dari 34 provinsi Indonesia.

Tabel 3. Kota Rawan Tertinggi
Indeks Kerawanan Pemilu di Indonesia



Sumber: Buku Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak Bawaslu RI 2024

Dalam diagram batang tersebut Kota Bandar Lampung berada pada peringkat 15 nasional paling rawan di Indonesia dan menjadi kota paling rawan di Provinsi Lampung.

Etika Politik dalam Dinasti Politik dan Proses Demokrasi Dinasti politik sering dikritik karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan dan meritokrasi. Dalam kasus Eva Dwiana, pencalonan yang didasari pada hubungan kekeluargaan dengan mantan Wali Kota Herman HN memunculkan pertanyaan etis. Apakah ini merupakan bentuk pelestarian kekuasaan yang bertentangan dengan semangat demokrasi, ataukah masyarakat memang memiliki preferensi terhadap sosok yang dianggap telah terbukti berpengalaman melalui hubungan keluarganya. Dari perspektif etika politik, penting untuk mempertanyakan apakah pencalonan ini memenuhi standar moral dalam memberikan kesempatan yang adil bagi calon-calon lainnya.

Pengaruh Dinasti Politik terhadap Pilihan Rakyat Dinasti politik sering kali

dianggap memiliki keunggulan dalam hal pengenalan publik dan akses ke sumber daya politik. Dalam kasus Eva Dwiana, apakah masyarakat Bandar Lampung benar-benar memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan mereka, atau mereka dipengaruhi oleh kuatnya pengaruh dinasti politik keluarga Herman HN Kondisi ini bisa menimbulkan situasi di mana pemilih merasa tertekan atau tidak memiliki alternatif yang kuat, sehingga memperlemah partisipasi politik yang sehat dan kompetitif. Dari penilaian tersebut penulis melakukan penelitian tugas akhir dengan judul **“Dinasti Politik Dalam Perspektif Etika Politik (Studi Kasus Eva Dwiana Di Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung 2024)”**.

1.2. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan tentang penelitian sebelumnya yang relevan dan digunakan sebagai referensi dalam penulisan ini. Beberapa tema berhubungan dengan apa yang selanjutnya akan diteliti oleh penulis, sehingga diharapkan mampu memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian.

Berikut penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai refrensi dalam penelitian ini, antara lain :

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Yunus (2018) dengan judul Etika dan Moralitas Politik Anggota Dewan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, tindakan anggota legislatif yang tidak bersandar pada etika dikarenakan kurangnya pemahaman mereka terhadap agama. Anggota dewan harus berpijak pada etika dalam tindakannya sebab pembenturan etika kerap terjadi di legislatif. Anggota legislatif harus bersandar pada etika agar kekuasaan digunakan untuk kepentingan masyarakat bukan kepentingan individu. Dengan bersandar pada etika, anggota dewan terhindar dari tindakan-tindakan tidak bermoral yang kerap terjadi di lembaga legislatif, seperti korupsi, bolos rapat, atau tidur saat sidang.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Putri (2019). dengan judul Politik Kekerabatan Dalam Pilkada Lampung Barat 2017 (Studi Pada Kemenangan Parosil

Mabsus). Dengan hasil penelitian, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Parosil Mabsus menang berkat semua unsur yang dikerahkan di lapangan, dimulai dari tim sukses, mesin-mesin jaringan sosial, dan partai politik. Tim sukses yang bekerja keras untuk kemenangan Parosil Mabsus dan didukung juga dengan jaringan dari Mukhlis Basri. Terdapat kerabat yang ikut turun dalam memenangkan Parosil Mabsus termasuk kakaknya yaitu Mukhlis Basri. Partai Politik yang mengusung Parosil Mabsus juga merupakan partai besar di Lampung Barat dan hal ini mempengaruhi suara pada kemenangan Parosil Mabsus. Kemenangan juga didukung oleh modal ekonomi berupa dana yang sudah dimiliki dimulai saat menjabat sebagai anggota DPRD Lampung Barat, modal sosial dengan terlihat jaringan yang dimiliki Parosil Mabsus dan modal politik yaitu pernah menjadi anggota DPRD Lampung Barat selama tiga periode dan Ketua DPC PDI Perjuangan Lampung Barat. Hal tersebut juga menunjang untuk kemenangannya pada pilkada Lampung Barat 2017.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Mardhiyulloh (2019) dengan judul Etika Politik dan Kekuasaan: Studi atas Pemilihan Ketua DPD RI Periode 2017-2019, Oesman Sapta Odang. Dengan hasil penelitian ini kepemimpinan Oesman Sapta Odang dinyatakan etis karena ia memiliki target untuk menguatkan peran DPD RI, hal itu dibuktikan dengan dipercayakannya DPD untuk mengevaluasi RUU peraturan daerah. Selain itu, mengacu pada kode etik DPD RI, kepemimpinan Oesman Sapta Odang yang juga menjabat sebagai ketua Partai Hanura dan wakil ketua MPR RI diperbolehkan dalam peraturan DPD RI, sedangkan yang dilarang dalam kode etik DPD RI adalah anggota DPD RI dilarang rangkap jabatan sebagai hakim peradilan, pegawai negeri sipil, atau anggota BUMN/BUMD.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Setiawan dan Fauzi (2019) dengan judul Etika Kepemimpinan Politik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia. Dengan hasil penelitian Kepemimpinan politik harus dijalankan dengan berpijak pada etika. Para aktor politik harus melegitimasi moral dalam kekuasaan untuk mencegah perilaku yang bertentangan dengan moral, seperti korupsi. Selain membenahi moralitas aktor politik dalam mencegah korupsi, diperlukan reformasi

birokrasi agar menciptakan birokrasi yang bersih tanpa praktik korupsi. Reformasi birokrasi juga membutuhkan etika agar dapat terlaksana.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Pangestu (2020) dengan judul *Dinasti Politik Dalam Perspektif Etika Politik*. Dengan hasil penelitian pencalonan Gibran masuknya anggota keluarga Jokowi dalam dunia politik di mana terjadinya peralihan kekuasaan secara tidak langsung yang melibatkan anggota keluarga Jokowi sehingga keluarga Jokowi mulai membangun dinasti politik. Dinasti yang dibangun keluarga Jokowi dikategorikan berbasis jaringan kuasa (*octopussy dynasties*) di mana menantu dan adik ipar Jokowi menduduki jabatan politik. Secara etika politik, pencalonannya sesuai dengan regulasi, mulai dari UUD NRI 1945, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada, AD/ART PDI Perjuangan, dan Peraturan PDI Perjuangan Nomor 24 Tahun 2017. Pencalonan Gibran dari sudut pandang dimensi etika politik dinyatakan etis. Namun, dari pendekatan normatif, pencalonan Gibran dikategorikan tidak etis karena ukuran moral di masyarakat memandang tidak adil sebab pencalonan Gibran dengan keistimewaannya sebagai anak Presiden Jokowi telah mengagalkan calon lain Achmad Purnomo yang berpengalaman di dunia politik dan memperoleh dukungan dari tingkat ranting (kelurahan) hingga cabang (kota).

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang akan Penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yunus (2018) mengangkat masalah lemahnya penerapan etika politik di kalangan anggota legislatif. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada aspek masalah yang sama-sama menyoroti isu etika politik, aspek metode yang menggunakan pendekatan kualitatif, aspek teori yang berlandaskan pada kerangka etika politik, serta aspek hasil yang menekankan pentingnya etika agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Perbedaannya, penelitian Yunus fokus pada etika anggota legislatif, sedangkan penelitian ini berfokus pada dinasti politik Eva Dwiana. Dari sisi metode, penelitian Yunus menggunakan deskriptif kualitatif, sedangkan penelitian ini lebih diarahkan pada studi kasus dinasti politik di tingkat lokal.

Dari sisi teori, penelitian Yunus menekankan moralitas keagamaan, sedangkan penelitian ini menggunakan dimensi etika politik (tujuan, sarana, dan aksi). Adapun pada hasil, penelitian Yunus menyoroti lemahnya moralitas anggota dewan, sementara penelitian ini menekankan implikasi etika politik dalam konteks dinasti politik.

2. Penelitian Putri (2019) membahas fenomena politik kekerabatan dalam Pilkada Lampung Barat 2017. Persamaannya dengan penelitian ini tampak pada aspek masalah yang sama-sama mengkaji politik kekerabatan dalam pemilihan kepala daerah, aspek metode yang menggunakan studi kasus kualitatif, aspek teori yang menyinggung modal politik dalam analisis, serta aspek hasil yang menunjukkan keterlibatan faktor sosial-politik dalam praktik kekerabatan. Perbedaannya terletak pada masalah yang dikaji, di mana penelitian Ara menyoroti kemenangan Parosil Mabsus, sedangkan penelitian ini menelaah dinasti politik Eva Dwiana. Dari sisi metode, penelitian Ara lebih menitikberatkan pada analisis jaringan sosial dan mesin politik, sementara penelitian ini berfokus pada etika politik. Dari sisi teori, penelitian Ara menggunakan konsep politik kekerabatan dan modal politik, sedangkan penelitian ini mengacu pada dimensi etika politik. Dari sisi hasil, penelitian Ara menegaskan kemenangan ditentukan oleh modal politik, sementara penelitian ini menilai keberlanjutan dinasti melalui perspektif etika politik.
3. Penelitian Mardhiyulloh (2019) mengkaji masalah etika politik dalam kepemimpinan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD RI. Persamaannya dengan penelitian ini terlihat pada aspek masalah yang sama-sama menyoroti etika politik dalam praktik kekuasaan, aspek metode yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, aspek teori yang mengacu pada kerangka etika politik, serta aspek hasil yang menunjukkan adanya dilema antara etika dan legalitas. Perbedaannya, penelitian Mardhiyulloh membahas kepemimpinan Oesman Sapta Odang di tingkat nasional, sedangkan penelitian ini menyoroti dinasti politik Eva Dwiana di tingkat lokal. Dari sisi metode, penelitian Mardhiyulloh menggunakan deskriptif analitis dalam konteks lembaga nasional, sementara penelitian ini berbentuk studi kasus

lokal. Dari sisi teori, penelitian Mardhiyulloh berlandaskan pada kode etik DPD, sedangkan penelitian ini berfokus pada dimensi etika politik (tujuan, sarana, dan aksi). Dari sisi hasil, penelitian Mardhiyulloh menyimpulkan kepemimpinan Oesman dinilai etis sesuai kode etik, sementara penelitian ini menilai praktik dinasti politik dari perspektif etika politik.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Fauzi (2019) menelaah etika kepemimpinan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Persamaannya dengan penelitian ini dapat dilihat dari aspek masalah yang menekankan peran etika dalam kepemimpinan politik, aspek metode yang sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, aspek teori yang berbasis analisis etika politik, serta aspek hasil yang menunjukkan pentingnya etika untuk mencegah korupsi. Perbedaannya terletak pada masalah penelitian, di mana penelitian Anang dan Erinda menyoroti kepemimpinan politik secara umum, sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada dinasti politik Eva Dwiana. Dari sisi metode, penelitian Anang dan Erinda menggunakan pendekatan kualitatif normatif, sementara penelitian ini menerapkan studi kasus. Dari sisi teori, penelitian Anang dan Erinda menekankan etika kepemimpinan dan reformasi birokrasi, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada dimensi etika politik dalam konteks dinasti. Dari sisi hasil, penelitian Anang dan Erinda menekankan pentingnya reformasi birokrasi berbasis etika, sementara penelitian ini menekankan praktik dinasti politik dalam demokrasi lokal.
5. Penelitian Pangestu (2020) mengangkat persoalan dinasti politik keluarga Jokowi melalui pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Persamaannya dengan penelitian ini ada pada aspek masalah yang sama-sama mengkaji isu dinasti politik, aspek metode yang menggunakan studi kasus kualitatif, aspek teori yang menggunakan kerangka etika politik, serta aspek hasil yang menekankan adanya perbedaan pandangan antara regulasi dan norma masyarakat. Perbedaannya terletak pada masalah, di mana penelitian Dina berfokus pada dinasti politik keluarga Jokowi, sementara penelitian ini berfokus pada dinasti politik Eva Dwiana. Dari sisi metode, penelitian Dina menyoroti level nasional, sedangkan penelitian ini menekankan level lokal.

Dari sisi teori, penelitian Dina mengaplikasikan dimensi etika politik pada pencalonan Gibran, sementara penelitian ini menerapkannya dalam Pilwakot Bandar Lampung. Dari sisi hasil, penelitian Dina menyimpulkan pencalonan Gibran etis secara hukum namun tidak etis secara normatif, sementara penelitian ini menilai dinasti politik Eva Dwiana berdasarkan tiga dimensi etika politik.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana bentuk keterlibatan Herman HN sebagai mantan Wali Kota Bandar Lampung dalam pencalonan istrinya Eva Dwiana pada Pilwakot 2024?
2. Bagaimana perspektif etika politik dalam melihat fenomena pencalonan Eva Dwiana di Pilwakot Bandar Lampung 2024?
3. Apa implikasi keberlanjutan kekuasaan dalam satu lingkaran keluarga terhadap kualitas demokrasi lokal di Kota Bandar Lampung?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk keterlibatan Herman HN sebagai mantan Wali Kota Bandar Lampung dalam pencalonan istrinya Eva Dwiana pada Pilwakot 2024.
2. Untuk mendeskripsikan perspektif etika politik dalam melihat fenomena majunya Eva Dwiana di Pilwakot Bandar Lampung 2024.
3. Untuk mendeskripsikan implikasi keberlanjutan kekuasaan dalam satu lingkaran keluarga terhadap kualitas demokrasi lokal di Kota Bandar Lampung.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu politik, khususnya dalam bidang etika politik dan dinasti politik. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah pemikiran tentang bagaimana praktik dinasti politik dipandang dari sudut etika politik, baik dalam kerangka normatif maupun implementatif.

Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji hubungan antara etika politik dan realitas politik lokal, terutama yang berkaitan dengan kontestasi politik yang melibatkan keluarga pejabat atau mantan pejabat publik.

2. Manfaat Praktis

a) Manfaat bagi mahasiswa

Penelitian ini memberikan manfaat bagi mahasiswa, khususnya yang menempuh studi di bidang ilmu politik, pemerintahan, atau etika, sebagai bahan kajian dan analisis kritis terhadap praktik dinasti politik dalam konteks demokrasi lokal.

Melalui penelitian ini, mahasiswa dapat memahami bagaimana dinamika pencalonan kepala daerah yang berbau dinasti politik dapat dianalisis melalui perspektif etika politik, serta menumbuhkan kesadaran kritis terhadap pentingnya nilai-nilai etis dalam proses demokrasi. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik dalam penulisan karya ilmiah sejenis di masa mendatang.

b) Manfaat bagi instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi politik, baik partai politik maupun lembaga penyelenggara pemilu, dalam menilai dan mengevaluasi praktik pencalonan yang mengandung unsur dinasti politik.

Melalui sudut pandang etika politik, instansi politik dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya menjunjung nilai-nilai keadilan, transparansi, dan integritas dalam proses seleksi dan pencalonan kandidat kepala daerah.

Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan internal partai atau peraturan yang lebih menjamin kompetisi politik yang sehat dan demokratis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Etika Politik

Etika politik adalah: “suatu penilaian kritis terhadap moralitas anggota masyarakat dan moralitas yang terkandung pada setiap proses pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya pada suatu masyarakat atau negara”. Etika politik termasuk ke dalam wilayah etika sosial yang memandang tanggung jawab manusia sebagai anggota masyarakat dalam hidup bersama. Etika sosial dibagi menjadi beberapa bidang, seperti etika politik, etika keluarga, etika profesi, etika pendidikan, etika lingkungan, dan sebagainya.

Dalam karya besarnya *Politics* (Aristotle, 350 SM/1996), Aristoteles menegaskan bahwa politik adalah sarana untuk mencapai kebaikan tertinggi (*summum bonum*) dalam kehidupan manusia. Negara (*polis*) dibentuk tidak hanya untuk menjaga hidup, tetapi untuk mewujudkan kehidupan yang baik (*good life*). Oleh karena itu, etika dan politik tidak dapat dipisahkan.

Dalam *Nicomachean Ethics*, Aristoteles menyatakan bahwa kehidupan politik yang baik hanya dapat dicapai apabila para pemimpinnya memiliki *phronesis* (kebijaksanaan praktis), yaitu kemampuan untuk bertindak berdasarkan pertimbangan moral demi kebaikan bersama (Aristotle, 350 SM/2004). Politik yang etis menurutnya adalah politik yang dijalankan oleh individu yang memiliki karakter bermoral, bukan sekadar mengikuti aturan hukum secara kaku.

Sedangkan dalam *Politics*, Aristoteles menekankan bahwa negara adalah persekutuan yang bertujuan untuk mencapai kebaikan tertinggi, dan pemimpin negara harus menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok (Aristotle, 350 SM/1996). Dimensi Etika politik dalam pandangannya mencakup:

1. Dimensi Tujuan berkaitan dengan orientasi akhir dari praktik kekuasaan. Menurut Aristoteles dalam *Politics*, politik sejatinya bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama (*summum bonum*), yakni terciptanya kehidupan yang adil, sejahtera, dan beradab bagi seluruh warga negara (Aristotle, trans. 1996). Politik yang tidak berorientasi pada kepentingan publik, melainkan semata-mata untuk mempertahankan kekuasaan keluarga atau kelompok tertentu, dipandang menyimpang secara etis. Dalam konteks demokrasi modern, tujuan politik yang etis harus mendukung prinsip-prinsip demokrasi substantif, seperti keadilan sosial, partisipasi rakyat, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (Rawls, 1999).
2. Dimensi Sarana yaitu cara atau instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Etika politik menolak prinsip Machiavellian yang menyatakan bahwa "the ends justify the means" (Machiavelli, *The Prince*, 1532). Dalam perspektif etis, cara untuk mencapai tujuan politik harus sah secara hukum dan bermoral secara substansial. Praktik politik uang, nepotisme, penyalahgunaan birokrasi, dan manipulasi opini publik merupakan contoh sarana politik yang tidak etis karena merusak integritas demokrasi (Heywood, 2013). Sebaliknya, sarana yang etis adalah yang menjunjung transparansi, keadilan prosedural, dan kesetaraan politik.
3. Dimensi Aksi Politik mengacu pada tindakan nyata aktor politik dalam menjalankan kekuasaan. Menurut Etzioni (1988), tindakan politik harus mengandung unsur tanggung jawab moral, integritas pribadi, serta akuntabilitas publik. Aksi politik tidak semata diukur dari efektivitas kebijakan, tetapi dari komitmennya terhadap prinsip etis, seperti menepati janji politik, keterbukaan terhadap kritik, dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Dalam konteks ini, pemimpin politik bukan hanya agen kekuasaan, tetapi juga pelayan publik yang wajib mempertanggungjawabkan tindakannya kepada konstituen.

Dengan demikian, menurut Aristoteles, politik sejati adalah etika yang dipraktikkan dalam skala publik, dan kekuasaan politik yang sah adalah yang dijalankan dengan adil, bertanggung jawab, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Dalam buku karya Kurniawan (2021) yang mengutip Zulkarnain, seorang filsuf Prancis Paul Ricoeur mengutarakan bahwa etika politik bukan sekadar berkaitan dengan perilaku individual, melainkan berkaitan juga dengan tindakan kolektif. Dalam konteks etika individual, apabila individu memiliki pandangan mengenai suatu hal dapat langsung direalisasikan dalam tindakan. Sementara itu dalam etika politik adalah etika sosial untuk bisa merealisasikan suatu pandangan, individu membutuhkan kesepakatan dengan masyarakat sebab menyangkut tindakan kolektif. Seperti yang Kurniawan (2021) kutip dari Mannuhung, menurut Paul Ricoeur, etika politik menuntut agar aktor politik mengusahakan kehidupan yang baik bagi anggota masyarakat, mengusahakan dalam memperoleh cakupan kebebasan yang lebih luas, dan membentuk institusi yang adil.

Etika politik mempersoalkan mengenai tanggung jawab manusia sebagai manusia terhadap negara dan tanggung jawab manusia terhadap hukum yang berlaku. Etika politik membutuhkan pertanggungjawaban moral dalam dimensi politik, artinya aktor politik tidak terlepas dari pertanggungjawaban moral dalam pengambilan keputusan dan pengimplementasian kebijakan. Sirait (2006) dalam bukunya mengutip pernyataan Verkuyl yang menyatakan etika politik tidak dapat mengabaikan mengenai asal mula kekuasaan diperoleh atau bagaimana sumber kekuasaan didapatkan, dikarenakan hal tersebut merupakan bagian dari norma-norma perilaku politik.

Etika politik bertujuan menghadirkan kepemimpinan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga terciptanya kepemimpinan yang mengedepankan nilai-nilai kebaikan. Etika politik diharapkan menumbuhkan sikap aktor politik yang bermoral dan menghindari perilaku yang menyimpang dari etika demi mencapai kebaikan bersama.

2.1.1 Dimensi Etika Politik

Perilaku aktor politik dalam hidup bernegara dapat dianalisis dengan menggunakan dimensi etika politik untuk mengukur etika politik seorang aktor politik. Tiga dimensi etika politik terdiri dari dimensi tujuan, dimensi

sarana, dan dimensi aksi politik.

Dimensi pertama, yaitu dimensi tujuan. Dimensi tujuan terlihat dari kesungguhan aktor politik dalam mengupayakan terciptanya masyarakat yang sejahtera dan kehidupan yang damai yang berlandaskan kebebasan dan keadilan. Kemampuan aktor politik dalam menentukan arah kebijakan yang jelas dan akuntabilitasnya menjadi parameter yang menentukan kualitas etika aktor politik.

Dimensi etika politik yang kedua yaitu sarana yang memungkinkan pencapaian tujuan. Dimensi sarana ini mencakup sistem dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi dalam praktik penyelenggaraan negara. Dimensi sarana mencakup pola normatif yaitu tatanan politik, seperti hukum dan institusi. Tatanan politik tersebut wajib menjunjung prinsip solidaritas, subsidiaritas, penerimaan pluralitas, serta struktur sosial ditata secara politik berdasarkan pada prinsip keadilan. Aspek moral dalam dimensi sarana terlihat pada peranan etika dalam menguji dan mengkritisi keabsahan keputusan-keputusan, institusi-institusi, dan praktik-praktik politik.

Dimensi etika politik yang ketiga yaitu aksi politik. Aspek etika dalam dimensi aksi politik adalah tindakan rasional dan bermakna. Dalam dimensi ini, yang sepenuhnya menentukan rasionalitas politik adalah aktor politik. Rasionalitas politik terdiri atas rasionalitas dalam bertindak dan kualitas moral aktor politik. Suatu tindakan politik dapat dikategorikan rasional diukur dari kemampuan aktor politik memahami permasalahan yang terjadi.

2.1.2 Urgensi Etika Politik bagi Kepala Daerah

Dalam menjalankan pemerintahan, keberadaan etika dalam berpolitik menjadi penting agar pemerintahan dijalankan dengan mengutamakan nilai-nilai dan norma moral. Etika bukan hanya diperlukan dalam bidang politik, keberadaan etika menjadi penting saat ini sehingga etika diperlukan dalam

setiap bidang kehidupan manusia. Etika semakin dibutuhkan dalam bidang-bidang kehidupan manusia, antara lain di bidang kedokteran, lingkungan hidup, bisnis, dan sebagainya.

Etika politik memuat nilai-nilai dan norma moral yang menuntun perilaku aktor politik dalam hidup bernegara. Etika politik menjadi kompas yang memberikan arah dalam berpolitik sehingga kepemimpinan akan menghadirkan rasa keadilan. Sikap dan tindakan para aktor politik dituntut berlandaskan pada etika dan moral yang menjadi landasan berperilaku. Kepemimpinan yang tanpa disertai etika politik tidak akan menghadirkan kesejahteraan, keadilan, serta kebahagiaan tertinggi masyarakat tidak akan terealisasi.

Politik yang erat dengan kekuasaan harus berlandaskan etika yang mengedepankan nilai-nilai moral. Etika politik dibutuhkan agar perilaku para aktor politik selaras dengan apa yang menjadi visi, misi, dan tujuan negara. Keberadaan etika politik dalam penyelenggaraan negara menjadi urgensi dalam dunia politik agar suatu pemerintahan dijalankan dengan mengutamakan nilai-nilai moral, seperti keadilan.

2.2. Dinasti Politik

2.2.1. Pengertian Dinasti Politik

Dalam menjalankan pemerintahan, keberadaan etika dalam berpolitik menjadi penting agar pemerintahan dijalankan dengan mengutamakan nilai-nilai dan norma moral. Etika bukan hanya diperlukan dalam bidang politik, keberadaan etika menjadi penting saat ini sehingga etika diperlukan dalam setiap bidang kehidupan manusia. Etika semakin dibutuhkan dalam bidang-bidang kehidupan manusia, antara lain di bidang kedokteran, lingkungan hidup, bisnis, dan sebagainya.

Etika politik memuat nilai-nilai dan norma moral yang menuntun perilaku

aktor politik dalam hidup bernegara. Etika politik menjadi kompas yang memberikan arah dalam berpolitik sehingga kepemimpinan akan menghadirkan rasa keadilan. Sikap dan tindakan para aktor politik dituntut berlandaskan pada etika dan moral yang menjadi landasan berperilaku. Kepemimpinan yang tanpa disertai etika politik tidak akan menghadirkan kesejahteraan, keadilan, serta kebahagiaan tertinggi masyarakat tidak akan terealisasi.

Politik yang erat dengan kekuasaan harus berlandaskan etika yang mengedepankan nilai-nilai moral. Etika politik dibutuhkan agar perilaku para aktor politik selaras dengan apa yang menjadi visi, misi, dan tujuan negara. Keberadaan etika politik dalam penyelenggaraan negara menjadi urgensi dalam dunia politik agar suatu pemerintahan dijalankan dengan mengutamakan nilai-nilai moral, seperti keadilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dinasti adalah: “keturunan raja-raja yang memerintah, semuanya berasal dari satu keluarga”. Para pakar seperti Dal Bo, Mark R. Thompson, dan Pablo Querubin memberikan pandangan mereka mengenai definisi dinasti politik. Dal Bo mendefinisikan bahwa: “dinasti politik merupakan keikutsertaan politisi yang mempunyai hubungan keluarga dengan politisi sebelumnya”. Mark R. Thompson mendefinisikan dinasti politik sebagai: “jenis lain dari transisi (peralihan) kekuasaan politik, langsung maupun tidak langsung, yang melibatkan anggota keluarga”. Pablo Querubin mendefinisikan dinasti politik adalah sebagai: “upaya khusus elite untuk mempertahankan dan menciptakan kembali kekuasaan mereka dari waktu ke waktu, di mana satu atau beberapa kelompok keluarga memonopoli kekuasaan politik”.

Dilihat dari sejarah keberadaannya, akar dinasti politik telah muncul sejak pada zaman Yunani Kuno sampai muncul dalam perpolitikan modern saat ini. Keberadaan politik kekerabatan atau dinasti politik merupakan strategi untuk membangun dan mempertahankan kekuasaan agar kekuasaan hanya berada di lingkaran keluarga dari generasi ke generasi. Menurut filsuf

Italia Mosca seperti yang dikutip oleh Heryanto (2019), munculnya fenomena dinasti politik disebabkan kecondongan para aktor politik mewariskan kelas politiknya pada generasi berikutnya atau generasi di bawahnya.

Menurut Stephen Hess seperti yang dikutip oleh Heryanto (2019), suatu kekuasaan dinasti politik dapat terus langgeng ataupun berakhir ditentukan oleh generasi penerusnya. Pada dasarnya, keinginan untuk tetap menjaga kekuasaan agar langgeng merupakan hasrat alamiah manusia yang selalu menginginkan berada dalam zona nyaman sehingga melakukan upaya agar kekuasaan tetap berada dalam genggamannya.

Keberadaan dinasti politik bertentangan dengan sistem demokrasi sebab demokrasi mengamini kekuasaan berakar dari masyarakat luas, sedangkan dinasti politik berakar dari adanya kekuatan keluarga. Eksistensi dinasti politik mampu memperkecil ruang partisipasi masyarakat luas dalam politik sehingga berlawanan dengan prinsip kesetaraan politik yang dijunjung dalam sistem demokrasi. Praktik dinasti politik hanya akan memperkuat gejala oligarkis karena kekuasaan dimonopoli keluarga sehingga berdampak pada lemahnya mekanisme pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances*) dalam suatu negara demokrasi.

2.2.2. Tipologi Dinasti Politik

Keberadaan dinasti politik dapat dibedakan dalam beberapa tipologi, di antaranya: *populism dynasties*, *octopussy dynasties*, dan *tribalism dynasties*.

1. Dinasti Berbasis Populisme (*Populism Dynasties*)

Dinasti politik berbasis populisme merupakan upaya untuk tetap mengamankan program yang telah dibangun oleh kepala daerah sebelumnya. Dinasti model ini berupaya mereproduksi wacana heroisme dan mengangkat program populis kepala daerah sebelumnya untuk

dijadikan sebagai objek kampanye politik bagi kerabatnya yang lain dalam memenangkan kontestasi politik.

Fenomena dinasti politik model populisme dapat diamati pada kasus Bupati Bantul 2010-2015, Sri Suryawidati yang menjabat sebagai bupati menggantikan suaminya, Idham Samawi yang telah menjabat sebagai bupati Bantul selama dua periode. Dalam konteks tersebut, istri didorong untuk menjadi bupati menggantikan suaminya, sementara suami memberikan arahan di balik kepemimpinan istri.

Dinasti politik berbasis populisme dibentuk secara *by accident* dan dibangun atas dasar romantisme pemimpin yang kerap menghadirkan citra pemimpin yang mampu bertindak adil dan membela masyarakat di tengah banyaknya praktik kepemimpinan politik yang erat dengan penyelewengan kekuasaan, seperti korupsi. Wujud romantisme pemimpin tersebut digambarkan dalam konsep *ratu adil* atau *satria piningit*.

2. Dinasti Berbasis Jaringan Kuasa (*Octopussy Dynasties*)

Dinasti model *octopussy* merupakan dinasti politik yang dibentuk berdasarkan pada jaringan kuasa. Dinasti model *octopussy* dibentuk berdasarkan adanya figur yang karismatik dan sinergi antara aktor formal dan informal. Karakter rezim dinasti model *octopussy* cenderung bersifat oligarkis. Dinasti politik model *octopussy* merupakan strategi politik kekerabatan yang dilakukan dengan terencana (*by design*) untuk mendorong para kerabatnya untuk menempati jabatan politik. Fenomena dinasti politik model *octopussy* dapat diamati dari dinasti Ratu Atut di Banten yang memperluas jaringan kekuasaan keluarganya dengan menempatkan anggota keluarga dan kerabatnya dalam berbagai jabatan politik di Banten.

3. Dinasti Tribalisme (*Tribalism Dynasties*)

Dinasti politik model tribalisme merujuk pada hubungan politik kekerabatan

yang berdasarkan pada identitas sosial, seperti ikatan kesukuan, marga, dan kekeluargaan. Tribalisme dimaksudkan pada menguatnya identitas kesukuan dan ikatan keluarga, terutama setelah diterapkannya semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang diwadahi dalam pilkada langsung.

Dalam dinasti politik model tribalisme, para aktor politik menggunakan sentimen kesukuan, etnisitas, dan semangat kedaerahan yang dijadikan 'barang politik' untuk menduduki jabatan politik di daerah. Dinasti model tribalisme dibentuk berdasarkan adanya reproduksi ritus-ritus budaya, primordialisme, klan politik, dan stratifikasi sosial. Karakter rezim dinasti tribalisme cenderung bersifat tertutup dan primordialistik. Fenomena dinasti politik model tribalisme dapat diamati dari dinasti Yasin Limpo yang merepresentasi kelas karaeng atau etnis Gowa Makassar dalam kontestasi politik.

Dinasti politik tribalisme terbentuk karena dipengaruhi oleh budaya politik yang bersifat subjektif di mana masyarakat telah menyadari adanya eksistensi pemerintah namun masyarakat lebih banyak diarahkan dalam kegiatan politik. Dinasti politik model tribalisme juga identik dengan kepemimpinan yang karismatik, nepotisme, dan oligarkis.

2.2.3. Terbentuknya Dinasti Politik

Terdapat beberapa faktor yang mendorong terbentuknya dinasti politik dalam suatu negara demokrasi, di antaranya: sosialisasi politik, rekrutmen politik, budaya patronase, dan institusionalisasi partai politik yang lemah.

1. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik adalah: "suatu proses, di mana seseorang individu bisa mengenali sistem politik, yang kemudian menentukan sifat persepsi-persepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik". Sosialisasi politik sebagai proses yang membantu mengenalkan

nilai-nilai kepada individu sehingga kemudian individu dapat terlibat dan berpartisipasi dalam suatu sistem politik.

Dalam proses sosialisasi politik, institusi sosial seperti keluarga berperan besar dalam membentuk pengetahuan politik bagi anggota keluarganya. Seorang anak yang dibesarkan dengan diberikannya pengetahuan politik dari orang tuanya mampu membuat anak tertarik mengenai politik. Dalam konteks negatif, sosialisasi politik yang dibentuk di ranah keluarga memungkinkan terbentuknya dinasti politik. Hal itu dikarenakan adanya pengetahuan politik dan pewarisan minat politik yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya.

2. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik adalah proses penyeleksian pemimpin, baik untuk menyeleksi pemimpin internal partai ataupun untuk menyeleksi pemimpin untuk menjabat dalam pemerintahan. Dalam hal ini, partai politik sebagai institusi formal yang memiliki peran dalam rekrutmen untuk menjaring aktor politik untuk kemudian menempati jabatan-jabatan politik. Menurut Firmanzah seperti yang dikutip oleh Rusnaedy (2020), rekrutmen politik sebagai tahap permulaan partai politik untuk bisa memperoleh sumber daya manusia, yang kemudian kandidat akan diseleksi selaras atau tidaknya visi dan misi kandidat tersebut dengan ideologi partai politik. Para kandidat yang memiliki kesamaan nilai dengan partai politik memiliki potensi untuk direkrut partai politik.

Dilihat dari peran partai politik tersebut, maka partai politik yang menentukan baik atau buruknya kualitas para aktor politik melalui kontestasi politik. Dalam melaksanakan fungsi rekrutmen politik, dinasti politik lahir karena rekrutmen yang bersifat tertutup dan partai politik cenderung bersikap pragmatis dengan memilih aktor politik yang berasal dari keluarga politik dan cenderung mengesampingkan aspek yang lebih

penting, seperti kapasitas individu. Menurut Fitriyah sebagaimana dikutip oleh Nizar dan Alqarni (2021), dengan adanya kepentingan praktis partai politik, fungsi rekrutmen politik dalam partai akan condong mengutamakan aspek-aspek tertentu, seperti popularitas, modalitas.

3. Budaya Patronase

Patronase didefinisikan sebagai: “pemberian uang tunai, barang jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (pekerjaan atau kontrak proyek) yang didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan untuk individu dan komunitas lainnya”. Hubungan patron-klien merupakan pola hubungan yang tidak sepadan, yang terjalin antara dua individu atau kelompok. Pola hubungan yang tidak sepadan tersebut dilihat dari segi kepemilikan sumber daya ekonomi, kekuasaan, atau status sosial sehingga menjadikan patron diposisikan sebagai superior dan klien sebagai inferior. Dinasti politik atau politik kekerabatan dapat terbentuk karena

masih menjamurnya politik patronase yang terjalin antara aktor politik dengan calon pemilih melalui bantuan perantara (*broker*) menjelang kontestasi politik. Politik patronase yang dilakukan aktor politik sehingga turut berperan dalam melanggengkan dinasti politik dapat berupa praktik pembelian suara (*vote buying*) dalam kontestasi politik, pemberian barang yang bersifat pribadi/*individual gift* (kalender, sembako, mukena), pendistribusian *club goods* (perlengkapan olahraga, alat musik, *sound system*), pelayanan dan aktivitas (pelayanan kesehatan gratis, demo memasak), dan lain sebagainya.

4. Institusionalisasi atau Pelembagaan Partai Politik yang Lemah

Menurut ilmuwan politik Vicky Randall dan Lars Svasand seperti yang dikutip oleh Riwanto (2016), institusionalisasi atau pelembagaan sistem kepartaian adalah: “proses pementapan partai politik baik dalam wujud perilaku yang mempola maupun dalam sikap atau budaya”. Politik

kekerabatan terbentuk karena lemahnya institusionalisasi di tubuh partai politik, salah satunya ditandai dengan tidak adanya demokratisasi di internal partai politik sehingga proses penentuan calon pemimpin jabatan politik ditentukan oleh elite-elite partai politik. Menurut Jimly Asshiddiqie seperti yang dikutip oleh Nurdin, Thaufan, dan Prayitno (2019), kinerja partai politik dapat ditingkatkan dengan memperkuat demokratisasi di tubuh partai politik sehingga tiap anggota partai politik dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

2.3. Demokrasi

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui wakil-wakil yang dipilih secara sah. Menurut Dahl (1998), demokrasi yang ideal setidaknya harus memenuhi dua dimensi utama: kesetaraan dalam partisipasi politik dan kontrol efektif warga atas agenda publik. Dalam masyarakat demokratis, seluruh warga negara memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri, memilih, dan dipilih, tanpa adanya dominasi struktural oleh kelompok atau individu tertentu.

Namun, dalam praktiknya, sistem demokrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia, sering kali menghadapi tantangan berupa munculnya dinasti politik, yaitu ketika jabatan-jabatan publik dikuasai secara berkelanjutan oleh individu yang berasal dari satu keluarga atau kelompok elite tertentu. Dalam konteks ini, Schumpeter (1942) mengingatkan bahwa demokrasi bukan hanya soal prosedural, tetapi juga membutuhkan kompetisi yang sehat dalam pasar politik agar tercipta sirkulasi elit yang adil dan rasional.

Kemunculan dinasti politik dapat mencederai nilai-nilai demokrasi substantif karena menghasilkan ketimpangan dalam akses kekuasaan dan mempersulit munculnya aktor politik baru yang tidak berasal dari kelompok elite. Hal ini sejalan dengan pendapat Diamond (2008) yang menyatakan bahwa kualitas

demokrasi sangat ditentukan oleh keterbukaan sistem terhadap akuntabilitas, partisipasi yang luas, dan perputaran kekuasaan. Ketika kekuasaan berpusat hanya pada segelintir keluarga politik, maka demokrasi menjadi “kosmetik” memenuhi syarat formal, namun gagal secara substansial.

Lebih jauh, keberadaan dinasti politik berpotensi menghambat regenerasi kepemimpinan dan memperkuat pola patronase serta nepotisme dalam birokrasi dan pemerintahan. Hal ini bertentangan dengan prinsip meritokrasi dan keadilan sosial yang menjadi semangat demokrasi itu sendiri.

Oleh karena itu, teori demokrasi menjadi kerangka penting dalam menilai apakah dinasti politik dapat dibenarkan secara normatif dan apakah ia selaras dengan prinsip dasar demokrasi. Melalui teori ini, skripsi ini akan mengkaji secara kritis praktik dinasti politik, tidak hanya dari sisi prosedural legalitas, tetapi dari sisi etis dan substantif yaitu apakah praktik tersebut masih menjamin kesetaraan politik, keadilan, dan partisipasi rakyat dalam kehidupan bernegara.

2.3.1. Hubungan Antara Demokrasi dan Dinasti Politik

Demokrasi secara ideal bertumpu pada prinsip kedaulatan rakyat, di mana setiap warga negara memiliki kesetaraan politik dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan (Dahl, 1989). Sistem demokrasi juga mensyaratkan adanya kompetisi terbuka dalam perebutan kekuasaan melalui mekanisme pemilihan umum yang bebas dan adil (Huntington, 1991).

Namun dalam praktik politik lokal di Indonesia, demokrasi sering kali menghadapi tantangan struktural, salah satunya ialah munculnya fenomena dinasti politik. Fenomena ini mengindikasikan adanya kecenderungan oligarki keluarga yang menguasai proses politik dan memanfaatkan mekanisme demokratis untuk melanggengkan kekuasaan, bukan untuk memperluas partisipasi rakyat (Robison & Hadiz, 2004).

Secara teoritis, dinasti politik dianggap sebagai bentuk distorsi terhadap demokrasi karena menciptakan ketimpangan dalam kompetisi politik dan melemahkan prinsip meritokrasi (Sukmajati, 2019). Dalam demokrasi substantif, kekuasaan seharusnya berganti melalui proses yang adil dan kompetitif. Namun dalam dinasti politik, proses tersebut seringkali dibatasi oleh jaringan kekerabatan dan sumber daya politik keluarga yang dominan.

Menurut Ambardi (2021), fenomena dinasti politik di Indonesia menunjukkan gejala “demokrasi elektoral tanpa demokratisasi substantif” di mana prosedur demokrasi seperti pemilu tetap berjalan, tetapi hakikat kesetaraan politik tidak terpenuhi karena kekuasaan tetap berputar di lingkaran keluarga yang sama. Sementara Fitriyah (2021) menjelaskan bahwa keberadaan dinasti politik menurunkan kualitas demokrasi karena:

1. Menutup peluang regenerasi politik yang sehat.
2. Mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem pemilu.
3. Menumbuhkan budaya politik patrimonial yang berbasis loyalitas pribadi, bukan integritas dan kompetensi.

Dalam perspektif demokrasi prosedural, keberadaan dinasti politik tidak serta-merta ilegal selama dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum dan pemilihan umum yang sah. Menurut Heywood (2013), demokrasi prosedural menilai legitimasi kekuasaan dari cara kekuasaan diperoleh, bukan dari siapa yang memperolehnya. Dengan demikian, selama anggota keluarga memenuhi syarat hukum dan dipilih oleh rakyat secara sah, fenomena dinasti politik tidak dapat dilarang secara konstitusional.

Namun, dalam perspektif demokrasi substantif, legitimasi kekuasaan tidak hanya diukur dari prosedur, melainkan juga dari nilai moral dan etika publik yang terkandung di dalamnya (Held, 2006). Di sinilah etika politik berperan penting untuk menilai apakah praktik dinasti politik sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kepentingan umum.

Salah satu dampak utama politik dinasti terhadap demokrasi adalah tergerusnya prinsip meritokrasi, yaitu sistem di mana jabatan publik seharusnya diperoleh berdasarkan kemampuan, bukan keturunan (Dwipayana, 2016). Ketika kekuasaan diwariskan secara genealogis, proses seleksi pemimpin menjadi tidak berdasarkan kapasitas dan integritas, tetapi berdasarkan hubungan keluarga.

Menurut Aspinall & Berenschot (2019), praktik seperti ini memperkuat oligarki elektoral, yaitu situasi ketika segelintir elite memonopoli sumber daya politik dan ekonomi, sehingga masyarakat hanya menjadi peserta pasif dalam demokrasi. Akibatnya, demokrasi kehilangan fungsi utamanya sebagai sarana untuk menciptakan kesetaraan politik dan akuntabilitas pemerintahan. Meskipun sering dipandang negatif, beberapa studi juga menunjukkan bahwa dinasti politik tidak selalu bertentangan sepenuhnya dengan demokrasi, tergantung pada konteks dan perilaku aktornya. Menurut Sucipto et al. (2023), dinasti politik dapat berperan positif apabila dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Dalam perspektif etika politik, seperti dikemukakan oleh Aristoteles dalam *Politics*, tujuan politik yang baik adalah *bonum commune* (kebaikan bersama). Apabila aktor dalam dinasti politik menggunakan kekuasaannya untuk melanjutkan program pembangunan, memperluas partisipasi perempuan, dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, maka praktik tersebut masih dapat dinilai etis dalam kerangka demokrasi yang substantif (Rawls, 1999).

Dengan demikian, hubungan antara demokrasi dan dinasti politik bersifat paradoks:

1. Dinasti politik dapat menjadi ancaman bagi demokrasi apabila menghambat regenerasi dan menurunkan keadilan politik.

2. Tetapi dapat juga menjadi peluang, apabila dijalankan dengan prinsip etika, tanggung jawab publik, dan transparansi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara demokrasi dan dinasti politik dapat dilihat melalui dua kerangka:

1. Kerangka prosedural menilai dari sisi legalitas dan mekanisme pemilu; dinasti politik sah selama memenuhi aturan demokrasi.
2. Kerangka substantif menilai dari sisi etika politik, keadilan, dan kepentingan publik; dinasti politik dapat mengancam demokrasi jika bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan perspektif etika politik sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana praktik dinasti politik dalam konteks lokal seperti kasus Eva Dwiana di Kota Bandar Lampung masih dapat disebut sejalan dengan semangat demokrasi atau justru bertentangan dengannya.

2.4. Kerangka Pikir

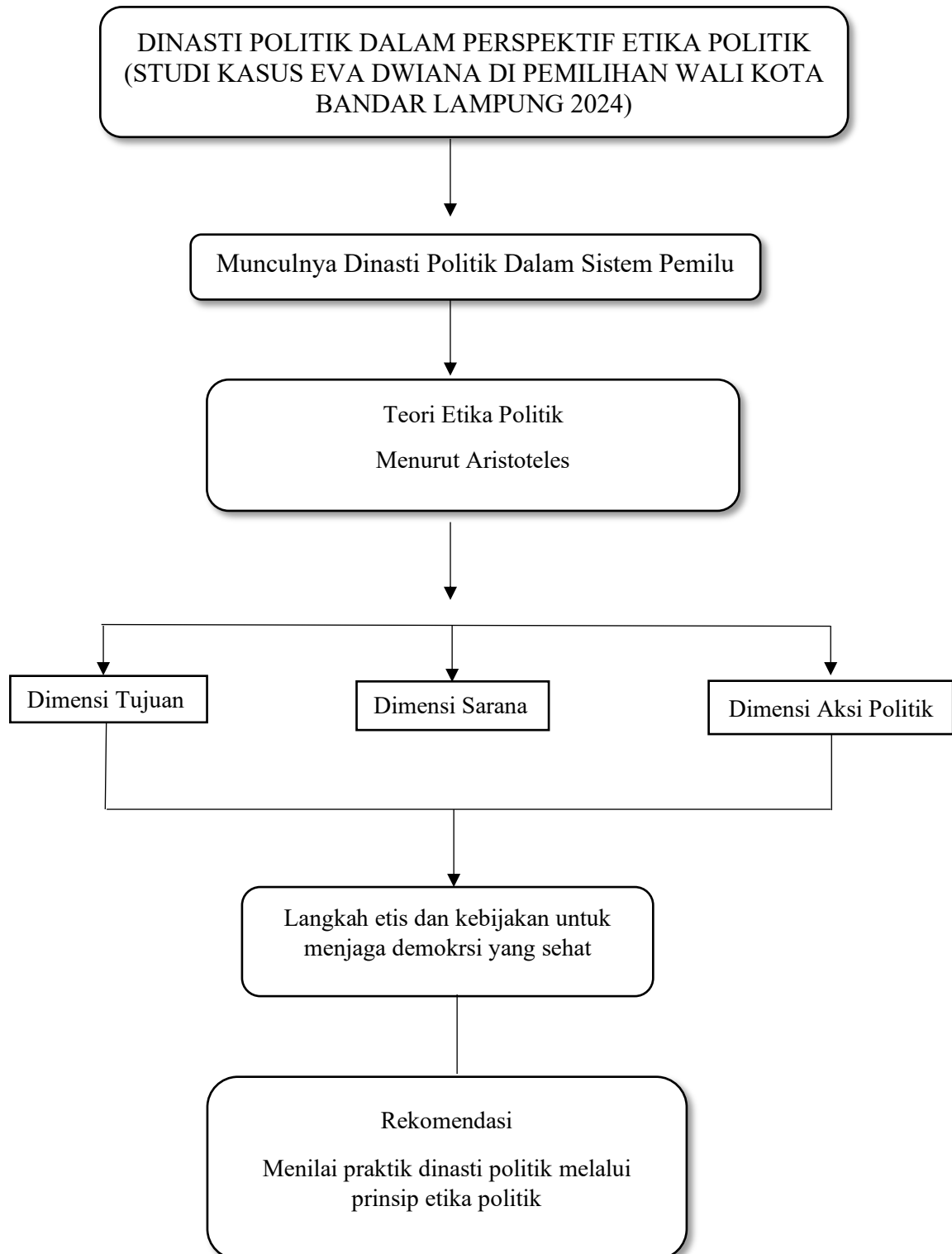
Sugiyono (2017) mendefinisikan kerangka pikir sebagai konsep yang tersusun secara logis dan menjelaskan hubungan antara teori teori dalam penelitian. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan idealnya dijalankan berdasarkan prinsip partisipasi yang setara, keadilan, dan akuntabilitas. Namun, dalam praktiknya, demokrasi di Indonesia mengalami tantangan dengan munculnya fenomena dinasti politik, yaitu kecenderungan konsentrasi kekuasaan pada satu keluarga atau kelompok tertentu dalam ranah politik.

Dinasti politik seringkali berkembang melalui proses pemilu yang sah secara hukum, namun menimbulkan persoalan etis karena mempersempit ruang partisipasi politik warga negara lainnya. Beberapa implikasi negatif yang muncul antara lain adalah terjadinya konsentrasi kekuasaan, ketimpangan akses terhadap jabatan publik, dan potensi praktik nepotisme.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan penting apakah keberadaan dinasti politik sesuai dengan prinsip-prinsip etika politik yang mengedepankan pemerintahan yang adil, bertanggung jawab moral dalam berpolitik, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Untuk menjawab pertanyaan ini, skripsi ini menggunakan pendekatan teori etika politik sebagai dasar analisis normatif.

Melalui pendekatan tersebut, dilakukan analisis kritis terhadap praktik dinasti politik yang berkembang, dengan tujuan menilai sejauh mana praktik tersebut mencerminkan atau justru bertentangan dengan nilai-nilai etika politik. Dari hasil analisis tersebut, penelitian ini akan memberikan kesimpulan dan rekomendasi terkait langkah-langkah etis serta kebijakan yang perlu diambil untuk menjaga kualitas demokrasi yang sehat dan adil di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan latar belakang serta uraian teori yang telah dikemukakan, maka disusun kerangka pikir untuk penelitian ini, sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Pendekatan Deskriptif merupakan penelitian yang digunakan untuk memberikan gambaran fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, kata-kata dan teks yang mendeskripsikan proses atau peristiwa secara mendalam, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2017).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena fokus utamanya adalah menggali makna, nilai, dan pandangan moral dalam praktik dinasti politik, bukan mengukur variabel secara statistik. Pendekatan kualitatif lebih sesuai untuk memahami fenomena secara mendalam, kontekstual, dan interpretatif, terutama dalam menganalisis dimensi etika politik seperti tujuan, sarana, dan aksi politik. Sementara pendekatan kuantitatif cenderung terbatas pada pengukuran angka dan generalisasi, pendekatan kualitatif memberikan ruang untuk menjelaskan dinamika kekuasaan dan moralitas secara lebih komprehensif (Creswell, 2014).

Penelitian Kualitatif dalam penelitian ini menggunakan data, wawancara, dokumentasi serta pengolahan data yang ditemukan di lapangan. Dalam konteks Etika Politik, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali pandangan dan pengalaman subjek terkait proses Dinasti Politik dalam Perspektif Etika Politik Dasar pertimbangan dalam penelitian ini mengenai Dinasti Politik Dalam Perspektif Etika Politik (Studi Kasus Eva Dwiana Di Pemilihan Wali Kota Bandar

Lampung 2024), yang membutuhkan data kontekstual dan faktual untuk menjawab rumusan masalah, dalam hal ini yaitu.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis praktik dinasti politik dalam perspektif etika politik, dengan mengambil studi kasus Eva Dwiana pada Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung 2024. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kekuasaan politik yang berlangsung dalam satu lingkaran keluarga dapat dinilai secara etis berdasarkan prinsip-prinsip tujuan, sarana, dan aksi politik.

Konsep utama yang digunakan adalah etika politik, yang dipahami sebagai penilaian moral terhadap tindakan politik berdasarkan tiga dimensi:

1. Tujuan politik, yaitu orientasi kekuasaan yang seharusnya mengarah pada kepentingan public
2. Sarana politik, yaitu cara-cara yang digunakan dalam meraih kekuasaan yang harus sesuai dengan hukum dan nilai moral serta.
3. Aksi politik, yaitu tindakan konkret pemimpin setelah berkuasa yang mencerminkan tanggung jawab, integritas, dan keberpihakan kepada rakyat.

Dalam penelitian ini, dinasti politik diposisikan sebagai konteks yang dikritisi secara etis.

Variabel utama mencakup orientasi kepemimpinan, metode kampanye dan perebutan kekuasaan, serta perilaku politik setelah menjabat. Indikator yang dikaji mencakup motivasi pencalonan, penggunaan kekuasaan dan sumber daya selama proses pemilu, serta konsistensi kebijakan terhadap janji kampanye.

Subindikator meliputi hubungan kekerabatan, jejak elektoral keluarga, serta keberadaan praktik nepotisme dan sentralisasi kekuasaan.

Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menilai apakah praktik dinasti politik di Kota Bandar Lampung dapat dibenarkan secara moral dalam kerangka demokrasi lokal dan etika kekuasaan publik.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian yang bertujuan untuk menemukan data data yang berisi jawaban dari fenomena yang terjadi sebenarnya. Penelitian ini dilaksanakan di Bandar Lampung, karena daerah ini merepresentasikan praktik dinasti politik elektoral yang relevan untuk dianalisis dalam perspektif etika politik. Figur Eva Dwiana, sebagai istri mantan Wali Kota Herman H.N., menjadi contoh konkret bagaimana kekuasaan politik lokal diwariskan dalam lingkup keluarga, meskipun melalui mekanisme pemilihan umum yang demokratis. Fenomena ini memunculkan persoalan etis terkait tujuan kekuasaan, cara memperoleh kekuasaan, dan tanggung jawab dalam mengelola kekuasaan tiga dimensi utama dalam etika politik (Suseno, 1997).

Kota Bandar Lampung dipilih juga karena memiliki karakter politik yang dinamis, partisipasi pemilih yang tinggi, serta aktor politik yang kuat secara struktural dan simbolik. Selain itu, keberadaan lembaga pemilu yang aktif dan masyarakat sipil yang kritis memberikan konteks yang ideal untuk menganalisis secara mendalam hubungan antara dinasti politik dan nilai-nilai etika politik seperti keadilan, integritas, dan kepentingan publik.

3.4. Jenis dan Data

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018) Data Primer merupakan data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data diperoleh langsung dari informan penelitian berupa hasil wawancara ataupun objek objek lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian tentang

Dinasti Politik dalam Perspektif Etika Politik (Studi Pada Pencalonan Eva Dwiana Di Pilwakot Bandar Lampung)

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018) Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, melainkan melalui studi kepustakaan atau studi dokumentasi. Data yang diperoleh dari sumber-sumber dokumen berupa jurnal penelitian, Undang-undang, peraturan, artikel, serta sumber lainnya yang dapat mendukung sebagai bahan referensi dalam penelitian ini.

3.5. Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2019) ketika melakukan penelitian kualitatif teknik pengambilan sampel yang dilakukan untuk mendapatkan sumber data informan yaitu teknik *purposive sampling*. Teknik pengambilan informasi ini di mana peneliti secara sengaja memilih individu yang dianggap paling relevan atau informatif untuk menjawab pertanyaan peneliti, adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 4. Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan	Alasan
1.	Arie Oktara, S.IP., M.A.	Ketua KPU Kota Bandar Lampung 2024-2029	Karena merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki otoritas dan informasi teknis terkait proses pencalonan, verifikasi administrasi, serta pelaksanaan Pilkada secara prosedural.
2.	Oddy Marsa JP., S.H., M.H.	Kordiv Penanganan Pelanggaran Dan Datin. Wakordiv Hukum dan Penyelesaian	Dipilih untuk memperoleh data dan pandangan mengenai pengawasan pelanggaran etika dan hukum selama proses

- | | | | |
|----|---|---|---|
| | | Sengketa Bawaslu
2023-2028 | Pilkada, termasuk
potensi penyalahgunaan
kekuasaan oleh petahana
dalam konteks dinasti
politik. |
| 3. | Budi Harjo, S.Sos., M.IP. | Akademisi Politik
dan Pemilu FISIP
Universitas
Lampung | Karena memiliki
kapasitas keilmuan dan
analisis teoritik yang
mendalam untuk menilai
praktik dinasti politik
dalam perspektif etika
politik dan demokrasi
lokal. |
| 4. | Siti Khoiriah, S.H.I.,
M.H. | Akademisi Hukum
Tata Negara FH
Universitas
Lampung | Karena memiliki
kompetensi akademik
dan perspektif teoritis
untuk menilai praktik
politik dinasti dari sudut
pandang etika politik
dan hukum tata negara. |
| 5. | Vincensius Soma Ferrer,
S.A.N., M.Si | Akademisi
Administrasi Negara
Universitas
Lampung | Karena memiliki
keahlian di bidang etika
birokrasi dan
administrasi publik,
sehingga mampu
memberikan analisis etis
dan tata kelola
pemerintahan (<i>good
governance</i>) terhadap
praktik dinasti politik,
dengan penekanan pada
integritas, transparansi,
akuntabilitas, dan
pencegahan
penyalahgunaan
kekuasaan. |
| 6. | Anita Noverda | Wartawan Madya
Lampung Ekspres | Karena berperan dalam
menyampaikan
informasi publik dan
memiliki sudut pandang
terhadap realitas politik
di lapangan, termasuk
bagaimana dinasti
politik diberitakan dan
diterima masyarakat. |

7.	Mayrozi Dwi Sulisty, S.Sos.i.	Sekretaris PCNU Kota Bandar Lampung 2022-2027	Karena merupakan organisasi keagamaan besar yang memiliki pengaruh moral dan sosial dalam masyarakat, sehingga penting untuk melihat perspektif etika politik dari sudut pandang nilai-nilai keagamaan.
8.	Steven Erlinto	Sekretaris PCMBI Kota Bandar Lampung	Karena mewakili organisasi masyarakat non-Islam, sehingga dapat memberi pandangan objektif dari perspektif keberagaman dan keterlibatan komunitas lintas agama dalam politik local.
9.	Melinda, S.Sos., M.M.	Sekretaris DPC PDI-Perjuangan Kota Bandar Lampung	Karena memiliki posisi strategis dalam proses pencalonan dan dapat memberikan pandangan otoritatif terkait dinamika. dinasti politik serta etika politik pada Pilkada 2024.
10.	Bisma Nugroho, S.IP	Alumni Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung 2025	Karena dapat merepresentasikan perspektif generasi muda laki-laki sebagai pemilih pemula yang kritis terhadap praktik politik lokal.
11.	Safira Ghassani, S.IP	Alumni Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung 2025	Karena dapat memberikan sudut pandang generasi muda perempuan, khususnya terkait aspirasi dan keterlibatan perempuan dalam politik.

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018) menjelaskan bahwa pengumpulan data dilakukan pada kondisi alamiah, sumber data primer, dan lebih banyak pada observasi serta wawancara mendalam dan dokumentasi. Jenis pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi yaitu :

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga pada objek objek alam yang lain teknik ini digunakan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, yang dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui interaksi verbal antara peneliti dan responden, di mana peneliti mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk menggali informasi yang mendalam terkait topik penelitian. Wawancara dalam penelitian ini bersifat semi-terstruktur atau tidak terstruktur, memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk mengeksplorasi jawaban lebih lanjut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis, seperti catatan, foto, atau arsip, yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini penting untuk memperkaya data dari observasi dan wawancara dengan bukti tambahan yang sudah ada.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data. Menurut Sugiyono (2018), teknik pengolahan data adalah proses untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ada beberapa langkah penting dalam pengolahan data terdiri dari:

1. Editing Data

Editing data bertujuan untuk memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan, dan konsistensi informasi yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Dalam konteks penelitian ini, proses editing dilakukan terhadap transkrip hasil wawancara dengan informan, dokumen resmi terkait pencalonan Eva Dwiana, serta sumber sekunder seperti berita dan artikel ilmiah.

Proses editing data dilakukan secara sistematis untuk menghindari adanya informasi yang tumpang tindih, tidak relevan, atau ambigu. Data-data yang bersifat duplikatif atau kurang sesuai dengan fokus penelitian yakni mengenai praktik dinasti politik dan perspektif etika politik dikelompokkan dan disaring ulang agar hanya data yang relevan yang masuk dalam tahap analisis. Selain itu, penyesuaian istilah dan ejaan juga dilakukan demi menjaga kohesivitas data sebelum dianalisis lebih lanjut dengan pendekatan deskriptif-kualitatif.

Dengan adanya proses editing ini, peneliti memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian benar-benar layak, valid, dan mendukung tercapainya tujuan penelitian secara akurat.

2. Klasifikasi

Dalam proses ini merupakan pengelompokan atau pengategorian data berdasarkan kriteria ataupun tabel tertentu, yang bertujuan untuk menyederhanakan data sebagai dasar dalam membuat kesimpulan, atau menghasilkan keputusan. Klasifikasi data ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam meninjau dan memperbaiki kembali.

3. Deskripsi

Tahap di mana peneliti memaparkan data yang telah dikumpulkan dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian. Dalam penelitian ini, terkait pencalonan Eva Dwiana pada Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2024. Data yang dikumpulkan meliputi informasi tentang latar belakang politik Eva Dwiana, relasi kekuasaan dengan Herman HN sebagai mantan Wali Kota, serta respons publik dan elite lokal terhadap pencalonannya. dibahas dalam kaitannya dengan proses mengedit hasil sehingga dapat disajikan dalam bentuk deskripsi.

3.8 Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, menjabarkan, menyusun, dan memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2019).

Aktivitas dalam analisis data menurut model Miles dan Huberman dalam (Winarni, 2018), meliputi pengumpulan informasi, data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan).

1. Reduksi Data

Menurut Winarni (2018) Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal hal pokok, memfokuskan pada hal hal penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data berikutnya.

Dalam tahapan ini peneliti menyaring informasi yang secara langsung berkaitan dengan pencalonan Eva Dwiana, seperti keterkaitan hubungan keluarga dengan Herman HN, jaringan politik yang digunakan, serta persepsi masyarakat dan tokoh politik lokal. Data yang tidak relevan atau tidak mendukung fokus analisis, seperti isu-isu yang bersifat teknis administrasi atau isu politik nasional yang tidak terkait langsung, dieliminasi untuk menjaga ketajaman fokus penelitian.

2. Penyajian Data

Menurut Winarni (2018) setelah data direduksi tahapan selanjutnya adalah menyajikan data. Data yang disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, gambar, foto, dan sejenisnya. Dalam penyajian data, maka akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Penyajian data dalam penelitian

ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau memaparkan hasil temuan dalam wawancara terhadap informan yang memahami pelaksanaan penelitian ini, serta melampirkan dokumen sebagai penunjang data.

3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Winarni (2018) dalam analisis data kualitatif langkah terakhir yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan. Tetapi, masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah ditemukan bukti yang kuat serta mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dengan mengambil inti dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi hasil penelitian. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini berupa penjelasan bagaimana pencalonan Eva Dwiana dapat dikategorikan sebagai bagian dari praktik dinasti politik, serta bagaimana praktik tersebut ditinjau dari perspektif etika politik.

3.9 Teknis Validasi Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi sumber untuk menjamin validitas data. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengkaji data dari berbagai jenis informan seperti KPU, Bawaslu, akademisi, wartawan, NU, dan tim sukses, guna memperoleh pemahaman yang utuh, kredibel, dan objektif terhadap praktik dinasti politik dalam perspektif etika politik.

Selain itu, peneliti juga melakukan *cross check* data antar dokumen (data sekunder) dan hasil wawancara (data primer), untuk menguji konsistensi informasi serta menghindari bias subjektivitas. Validasi ini penting dalam pendekatan kualitatif agar interpretasi data benar-benar mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena dinasti politik yang terjadi dalam pencalonan Eva Dwiana sebagai Wali Kota Bandar Lampung 2024, setelah suaminya, Herman HN, menjabat selama dua periode. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, penelitian ini memberikan sejumlah kesimpulan yang relevan dengan proses politik, etika politik, serta dampak keberlanjutan kekuasaan dalam satu lingkaran keluarga terhadap kualitas demokrasi lokal di Kota Bandar Lampung.

1. Keterlibatan Herman HN dalam Pencalonan Eva Dwiana

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Herman HN berperan signifikan dalam pencalonan Eva Dwiana, baik sebagai pendukung utama maupun sebagai figur sentral yang membangun jaringan politik yang kuat. Sebagai mantan Wali Kota, Herman HN memiliki basis dukungan politik yang besar, yang menjadi salah satu kekuatan utama dalam pencalonan Eva. Keterlibatan Herman HN melibatkan pengelolaan partai politik, organisasi sosial, dan jejaring masyarakat yang telah terbangun selama dua periode kepemimpinannya. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh keluarga dalam politik Bandar Lampung sangat kuat, dan ini berpotensi menciptakan kesinambungan dalam program-program pemerintahan.

2. Perspektif Etika Politik

Dari sudut pandang etika politik, fenomena dinasti politik ini memunculkan dilema mengenai keadilan dalam kompetisi politik.

Pencalonan Eva Dwiana, meskipun sah secara prosedural, menimbulkan pertanyaan etis terkait dengan kesetaraan peluang bagi calon-calon lain yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan penguasa sebelumnya. Etika politik menekankan pada pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan dalam politik, dan keberlanjutan kekuasaan dalam satu keluarga dapat dianggap sebagai bentuk dominasi yang mengurangi kompetisi yang adil dalam proses pemilihan kepala daerah.

3. Implikasi Keberlanjutan Kekuasaan dalam Satu Lingkaran Keluarga

Keberlanjutan kekuasaan dalam satu lingkaran keluarga dapat memberikan stabilitas dalam pemerintahan, terutama dalam hal kesinambungan program-program pembangunan yang telah dimulai oleh Herman HN. Namun, hal ini juga berpotensi menurunkan kualitas demokrasi lokal. Praktik dinasti politik, meskipun dapat menjamin keberlanjutan pembangunan, dapat memperlemah kompetisi politik yang sehat, mengurangi munculnya pemimpin baru yang memiliki ide segar, serta memperkecil kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin berdasarkan kinerja dan kompetensi, bukan hanya hubungan keluarga.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu):

Diharapkan terus memperkuat pengawasan terhadap penggunaan fasilitas pemerintah dan potensi kampanye terselubung oleh petahana. Selain itu, program pendidikan pemilih harus ditingkatkan agar masyarakat memiliki kesadaran kritis dalam memilih pemimpin berdasarkan integritas, bukan semata popularitas atau faktor keluarga.

2. Bagi Partai Politik:

Seleksi calon kepala daerah hendaknya tidak hanya mempertimbangkan faktor elektoral, tetapi juga menekankan pada rekam jejak, integritas, dan kontribusi nyata terhadap masyarakat serta partai. Hal ini penting untuk menjaga marwah etika politik sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi lokal.

3. Bagi Tokoh Agama dan Masyarakat Sipil:

Tokoh agama, organisasi masyarakat, dan akademisi diharapkan semakin aktif dalam memberikan pendidikan politik berbasis nilai moral dan etika. Masyarakat juga perlu lebih berperan sebagai pengawas sosial, sehingga dapat menekan praktik politik yang menyimpang dari nilai keadilan dan kemaslahatan bersama.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya:

Penelitian ke depan diharapkan dapat memperluas kajian dengan melibatkan lebih banyak narasumber dari berbagai latar belakang, serta menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur sejauh mana pemahaman dan penerapan etika politik benar-benar berpengaruh terhadap perilaku pemilih dan hasil pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara. 2021. *Akhirnya KPU tetapkan Wali Kota dan Wawali Bandarlampung terpilih*. ANTARA.
- Putri, 2019. *Politik Kekerabatan Dalam Pilkada Lampung Barat 2017 (Studi Pada Kemenangan Parosil Mabsus)*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
- Dwipayana, A. G. N. 2016. *Dinasti politik di Solo*. Tempo.co.
- Berdikari.co. 2022. *Membedah Kinerja Eva Dwiana (Bagian 3), Aktif Kegiatan Sosial, Keagamaan dan Budaya*.
- Biro Pusat Statistik. 2024. *Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2024*. BPS Kota Bandar Lampung.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. 2024. *Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2021*. BPS Kota Bandar Lampung.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. 2024. *Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2023 Tumbuh 4,55 Persen*.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. 2025. *Produk Domestik Regional Bruto Kota Bandar Lampung Menurut Pengeluaran 2020–2024*.
- BPK Lampung. 2024. *Kota Bandar Lampung*. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung.
- Cahyadi. 2021. *Etika Politik dan Pemerintahan*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Dahl, R. A. 1998. *On Democracy*. Yale University Press, New Haven and London.
- Detik. 2025. *Daftar Kabupaten dan Kota di Lampung: Geografi, Luas Wilayah, Penduduk*. detikSumbagsel.
- Detik Sumbagsel. 2024. *Bukit Sakura Kemiling, Rekomendasi Wisata ala Jepang di Lampung*.
- Diamond, Larry. 2008. *Semangat Demokrasi: Perjuangan untuk Membangun Masyarakat Bebas di Seluruh Dunia*, Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Dina Pangestu 2020. Dinasti Politik Dalam Perspektif Etika Politik. *Jurnal Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Dinamik. 2023. *Pemkot Bandar Lampung Eva Dwiana Terima Penghargaan Kepala Daerah Pembina Olahraga dari Kemenpora*. Dinamik.id.
- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. 2025. *Bukit Sakura*.
- Dinkes Bandar Lampung. 2025. *Puskesmas & Fasilitas Kesehatan di Bandar Lampung*. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
- Egaleonita, A. 2023. *Eva Dwiana Terima Penghargaan Innovative Government Award IG 2023*. Helo Indonesia.
- Ensiklopedia.net. 2019. *Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Bandar Lampung*. Ensiklopedia.net.
- Fitriyah, F. 2020. Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 1–17.
- Heryanto, Gun-Gun. 2019. *Politik Literasi Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi*. Ircisod.
- Hello Sehat. 2022. *7 Rekomendasi Rumah Sakit di Bandar Lampung dengan Fasilitas Terbaik (termasuk RS Advent)*. HelloSehat.com.
- IDN Times Lampung. 2021. *Profil Eva Dwiana, Wali Kota Bandar Lampung Senang Disapa Bunda*.
- IDN Times Lampung. 2025. *Perjalanan politik Eva Dwiana, nyalon wali kota tapi tak diusung PDIP*.
- IDN Times Lampung. 2025. *Hadiri Paripurna, Eva Dwiana Paparkan Program 2025-2030*.
- Info Nusantara. 2023. *SMSI Lampung Award 2023, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana Raih Penghargaan Kepala Daerah Peduli UMKM*. Info Nusantara.
- Intelligence. 2019. Emotional intelligence predicts academic achievement in Pakistani management students. *International Journal of Management Education*, 17(2), 286–293.

- ITERA. 2021. *BAB III Gambaran Umum Wilayah Kota Bandar Lampung*. Institut Teknologi Sumatera.
- ITERA. 2023. *BAB III GAMBARAN UMUM 3.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung 3.1.1 Kondisi Geografis*. Institut Teknologi Sumatera.
- Jabungonline.com. 2025. *Keberagaman Etnis di Provinsi Lampung: Potret Persentase Suku Bangsa yang Hidup Berdampingan*.
- Jackman. 2014. Alien Abduction and Voter Impersonation in the 2012 U.S. General Election: Evidence from a Survey List Experiment. *Election Law Journal Rules Politics and Policy*, 13(4), 460–475.
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan).
- Kompas TV. 2021. *Ditetapkan Sebagai Pemenang Pilkada, Eva Dwiana-Deddy Amrullah Sujud Syukur*.
- Kominfo Bandar Lampung. 2024. *Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana, Satu-satunya Walikota Yang Menerima Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI pada Acara Puncak Hari UMKM Nasional 2024*. Diskominfo Bandar Lampung.
- Kumparan. 2022. *FJPI Lampung dan Wali Kota Eva Dwiana Bahas Program Literasi untuk Perempuan*.
- Kumparan.com. 2025. *Pidato Perdana, Wali Kota Eva Dwiana Paparkan Visi Misi Bandar Lampung 2025-2030*.
- KupasTuntas.co. 2022. *Kupas Tuntas – Membedah Kinerja Eva Dwiana (Bagian 2), Wanita Tangguh dan Dekat dengan Rakyat*.
- Kupastuntas.co. 2025. *Eva Dwiana: Visi 'Kota Gemilang' Jadi Arah Baru Pembangunan Bandar Lampung*.
- LampungPro.co. 2024. *Raih Cumlaude, Wali Kota Bandar Lampung Lulus Magister Hukum Ekonomi di UIN Lampung*.
- LampungPro.co. 2025. *Warga Rajabasa Jaya Keluhkan Minimnya Fasilitas Kesehatan: "Belum Ada Puskesmas Rawat Inap"*. LampungPro.co.
- Mata-Mata.id. 2024. *Raih Predikat Cumlaude, Wali Kota Eva Dwiana Resmi Menyandang Gelar Magister Hukum Ekonomi UIN RIL*.
- Medcom.id. 2024. *Fakta Menarik Tentang Populasi Suku di Provinsi Lampung*.

- MediaLampung.co.id. 2022. *Bunda Eva Buka Pelatihan Fasilitator Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak*.
- Medialampung.co.id. 2024. *Eva Dwiana Raih Gelar Magister di UIN Raden Intan Lampung*.
- Merit Systems Protection Board. 2019. *The Merit System Principles: Keys to Managing the Federal Workforce*.
- Minindwiana. 2015. *Selalu Jaga Komunikasi dengan Keluarga*.
- Moleong. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardhiyulloh. 2019. Etika politik dan kekuasaan (studi atas pemilihan ketua DPD RI Periode 2017-2019, Oesman Sapta Odang).
- NewsLampungterkini.com. 2025. *Visi Misi Paslon Eva Dwiana–Deddy Amarullah*.
- Nizar, Moh dan Wais Alqarni. 2021. *Book Series Demokrasi dan Otonomi Daerah. Dinasti Politik dan Demokrasi Lokal*. Aceh: Syiah Kuala University Press.
- PPPA. 2023. *Pemerintah Kota Bandar Lampung Menerima Penghargaan Sebagai Kota Layak Anak Kategori Nindya*. Diskominfo Bandar Lampung.
- PariwisataLampung.com. 2025. *Pantai Mutun dan Pulau Pahawang*.
- Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN).
- Pratama, M. I. 2022. *Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana Sabet Penghargaan Driving Investment Growth*. KabarSiger.
- Riwanto. 2016. *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*. Thafa Media: Yogyakarta.
- RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo. 2025. *Profil Rumah Sakit*. RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung.
- Rusnaedy, Zaldi. 2020. *Dinasti Politik di Aras Lokal*. Yogyakarta: Deepublish.
- Saputra, T. 2025. *Bandar Lampung Kembali Raih WTP, Eva Dwiana: Ini Hasil Kerja Keras Bersama*. detikSumbagsel.
- Schaar, V. der. 2024. *Politik Indonesia*. Indonesia Investment.

- Schumpeter, J. 1942. *Capitalism, Socialism and Democracy*. New York: Harper.
- Setiawan. 2023. *Wali Kota Eva Dwiana Menerima Penghargaan Innovative Government Award IG 2023*. Media Lampung.
- Setiawan, Fauzi. 2019. *Etika Kepemimpinan Politik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia*.
- Sindonews. 2024. *Sukses Berdayakan UMKM, Wali Kota Bandar Lampung Raih Pemimpin Daerah Awards 2024*. SINDOnews.com.
- Sirait, Hamonangan. 2006. *Politik Kristen di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Smartnews.id. 2025. *Setahun Memimpin, Eva Dwiana–Deddy Amarullah Berhasil Bangun Kota Bandar Lampung*.
- SuaraLampung.id. 2024. *Hj. Eva Dwiana, SE*.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Sumsel24. 2023. *Profil Lengkap Eva Dwiana, Walikota Perempuan Pertama di Bandar Lampung*.
- Thaufan. 2019. *Prahara Partai Islam: Komparasi Konflik Internal PPP dan PKS*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- UIN Raden Intan Lampung. 2025. *UIN RIL dan ITERA Perkuat Kolaborasi Saintek, Riset Halal, dan Kesehatan Mental*. Humas UIN RIL.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. 1999.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. 2004.
- Winarni, Widi. 2018. *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yunus, Rohim. 2018. *Etika dan Moralitas Politik Anggota Dewan*. *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, No. 2.